

**Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan (Studi
Kasus di Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Dosen Pembimbing:

Dr. H. M. Ismail, S.Sos, MH, M, M.Si,

Disusun Oleh:

Furi Imanuria

(E04213030)

PRODI POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Furi Imanuria

NIM : E04213030

JURUSAN : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 September 2019



Furi Imanuria

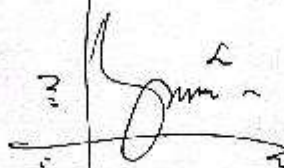
E04213030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh *Fari Imanurra* ini telah diperiksa dan
dipersetujui untuk diajukan.

Surabaya, 25 September 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ismail', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a vertical line on the left side.

Dr. H. M. ISMAIL, S.Sos, MH, M, M.Si
NIP. 196005211986081001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Furi Imanuria ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 20 Februari 2020

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

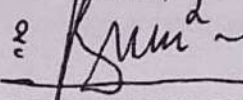
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Dekan,



Dr. H. Kusnawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

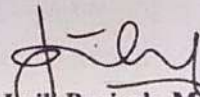
Tim Penguji :

Ketua,



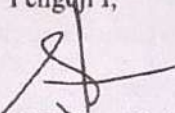
Dr. H. M. Ismail, M.H., M.Si
NIP. 196005211986081001

Sekretaris,



Dail Bariroh, M. Si
NIP. 197711032009122002

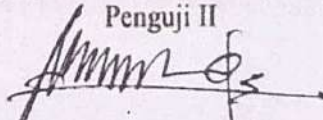
Penguji I,



Dr. Khoirul Yahya, S. Ag, M. Si

NIP. 197202062007101003

Penguji II



M. Anas Fakhruddin, S. Th. I, M. Si

NIP. 19820210200901100



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Furi Imanuria
NIM : E04213030
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Pemikiran Politik Islam
E-mail address : Awandini13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
Implementasi Program Pembangunan Insfrastuktur di Pedesaan
(Studi Kasus di Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 September 2023

Penulis



(Furi Imanuria)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo). Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa.

Dalam implementasi penulis menemukan, bahwa proses-proses dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur ada banyak kurangnya dan tidak sesuai dengan SAP. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 untuk program pembangunan infrastruktur desa ditentukan dengan SAP. Program pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa, dana desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota khusus untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diberikan setiap tahun sekali, total dana desa yang diberikan melihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis. Namun penulis menemukan beberapa bangunan infrastruktur desa yang belum sesuai bahkan banyak bangunan lama yang belum direnovasi.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Konseptual.....	11
1. Implementasi.....	11
2. Kebijakan	13
3. Implementasi Kebijakan.....	14
4. Undang-Undang	14
5. Pembangunan	15
6. Infrastruktur	16
7. Desa	18
BAB II	20
KAJIAN TEORI	20
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Konsep Kebijakan Publik	23
C. Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn.....	30
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	32
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
C. Pemilihan informan dan Pemilihan Objek Penelitian.....	36
D. Tahap-Tahap Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	44
H. Sistematika Pembahasan	46
BAB IV.....	47
ANALISA DAN PEMBAHASAN	47
A. Penyajian Data	47
B. Pembangunan Infrastruktur Desa Wonoayu.....	75
C. Analisa Dan Pembahasan	85
D. Temuan Hasil Penelitian.....	90
BAB V.....	93
PENUTUP	93
A. KESIMPULAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa mendatang, Implementasi kebijakan pada sektor pembangunan infrastruktur akan semakin mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pembangunan infrastuktur tersebut akan menyasar pada wilayah desa. Dampak yang ditimbulkan dari pertumbuhan pembangunan infrastruktur akan memberikan pengaruh pada sector ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, dampak lain yang dapat diperoleh dari pertumbuhan pembangunan terhadap infrastruktur yaitu perubahan pola pikir dan cara berpolitik masyarakat. Dengan begitu masyakat desa dapat menerapkan kehidupan berpotik yang demokratis diwilayah desa tersebut. Pada kenyataannya, hingga sekarang masih ada desa yang masih belum dapat belajar tentang cara berpolitik yang baik. Padahal sejatinya, desa merupakan salah satu sector yang dapat menunjang kehidupan masyarakat kota. Salah satu bukti bahwa masyarakat desa merupakan penunjang kehidupan masyarakat di kota, yaitu hasil dari tanaman dan tangkapan nelayan yang dikirim ke kota. Dengan begitu, sudah selayaknya pembangunan infrastruktur di pedesaan lebih diperhatikan pemerintah.¹

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana sebuah desa yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membangun desanya dengan

¹ Hernowo, Basah. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2004.

kerjasama dan gotong-royong. Peraturan yang sudah ditetapkan yang sudah disepakati bersama harus ada bukti nyata atau implementasinya dari peraturan tersebut.

Untuk melaksanakan impian orang-orang terdahulu yang dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah seharusnya bahwa setiap desa hendaknya mempunyai hak yang berkaitan dengan sejarah desa serta hak yang berpegang teguh pada norma dan adat sebuah desa. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat dibuktikan dengan nyata oleh masyarakat.

Berlandaskan sejarah ketatanegaraan Indonesia, perkembangan desa mengalami perkembangan yang semakin pesat. Oleh karena itu, desa butuh perlindungan yang memadai dan perlu dieksplor dengan ketentuan yang sesuai. Hal tersebut dilakukan untuk tetap mempertahankan keotentikan sebuah desa. Selain itu, sebuah desa perlu dijaga agar dapat memajukan, membuat mandiri, serta dapat meningkatkan sikap demokratis masyarakat desa tersebut. Dengan upaya tersebut diharapkan pemerintah desa dapat membuat dasar yang kokoh dalam pemerintah. Sehingga keinginan untuk mensejahterakan masyarakat dalam segala sector kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Tujuan adanya pembangunan terhadap desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tujuan lain yang dapat diperoleh adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tersebut. Dengan begitu diharapkan, masyarakat dapat terhindar dari

kemiskinan. Kemiskinan dapat terjadi pada seseorang, jika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana bagi sebuah desa dan kurangnya pemaksimalan potensi yang dimiliki desa serta masyarakat yang tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk keadaan masyarakat desa. Mengacu pada Undang-Undang Pembangunan Desa ayat (2) tertulis, bahwa pembangunan sebuah desa dapat terlaksana dengan baik, jika pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama. Sikap Kerjasama tersebut dikerjakan dengan rasa kekeluargaan dan diwujudkan dalam bentuk gotongroyong. Hal tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia.

Penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah desa dikerjakan berdasarkan dengan perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten atau Kota. Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa harus sejalan dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Hal tersebut sejalan dengan aturan terkait peraturan desa ayat 2. Kedua perencanaan tersebut ialah sebuah perencanaan yang diarsipkan dalam satu dokumen yang sama dalam pemerintahan desa. Selain itu, kedua perencanaan tersebut juga digunakan sebagai acuan dalam Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Jika pemerintah daerah memiliki program kerja, maka program kerja tersebut sudah selayaknya dibicarakan dengan

pemerintah desa. Hal tersebut dikerjakan dengan tujuan, agar tetap terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

Setelah koordinasi yang baik antar kedua sector pemerintahan, maka Langkah selanjutnya yaitu pemerintah desa menyampaikan hasil koordinasi tersebut kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan, agar peran dari masyarakat tetap berjalan dengan baik. Peran masyarakat tersebut yaitu memantau pelaksanaan pembangunan desa. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui, apakah rencana dan pelaksanaan yang dilakukan telah sejalan atau bahkan sebaliknya. Jika ada yang tidak sejalan antara perencanaan dan pelaksanaan, maka masyarakat dapat mengadukan hal tersebut ke bagian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kewajiban pemerintah desa yaitu memberikan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga hendaknya mengetahui juga terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa. Hal tersebut dapat diperoleh masyarakat melalui layanan informasi. Pemerintah desa juga hendaknya membuat laporan kepada masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah tersebut hendaknya dilakukan sekali selama setahun dalam periode pemerintahan yang sama.

Unsur pemerataan pembangunan dan hasil yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat merupakan tujuan yang harus diwujudkan oleh pemerintah desa. Tujuan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan

melakukan pembangunan infrastruktur desa. Jika hal tersebut mampu diwujudkan oleh pemerintah desa, maka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah akan berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan pembangunan tersebut langsung dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur pembangunan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa setempat. Pemerintah desa bertugas untuk membuat wewenang, melaksanakan tugas, serta membantu masyarakat desa. Hal tersebut merupakan bagian dari otonomi daerah.

Pola manajerial dibutuhkan oleh sebuah desa dengan tujuan untuk mengelola pembangunan. Tujuan dari pola manajerial yaitu agar program yang telah dibuat pemerintah desa dapat menghasilkan pembangunan yang telah sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan begitu, hasil pembangunan tersebut dapat digunakan dengan maksimal oleh masyarakat.² Untuk mewujudkan hasil yang ideal, maka Kerjasama antara pemerintah desa, swasta, dan masyarakat perlu dilakukan dengan baik. Demi mewujudkan pembangunan desa yang maksimal, maka pemerintah hendaknya terus melakukan pembangunan yang baik dan terencana bagi pemerintah desa.³ Fasilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar dapat membangun infrastruktur ditingkat desa, yaitu Posyandu, Posbindu, Jalan Desa, Lampu Desa, Sekolah PAUD, Jembatan, Sambungan Air, dll.

²Kamaludin, Rustian, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983).

³ Moh. Sofiyanto Ronny, Malavia Mardani, M. Agus Salim, E-Jurnal Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, Vol. 6 No. 4, 2017.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan landasan yang digunakan dalam pembangunan desa. Usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dilakukan dengan membangun desa.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 menyatakan, bahwa Kepala desa memiliki tugas untuk menjalankan pemerintah desa, merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Desa. Selain itu berdasarkan pasal 26 kepala desa juga bertugas untuk memberikan pembinaan kepada masyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas lain yang perlu dikerjakan oleh kepala desa yaitu mengkoordinasi pembangunan yang telah direncanakan.⁴

Untuk membuat pembangunan sarana dan prasarana yang baik, maka pemerintah desa hendaknya melibatkan peran masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat berperan sebagai pelaksanaan, pengontrol dan pengawas dalam pembangunan yang dilakukan. Jika pemerintah desa memberikan kuasa pembangunan kepada kontraktor, maka perlu adanya control yang maksimal oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dengan harapan yang telah dirancang oleh pemerintah desa. Namun sebaliknya, jika pengerjaan pembangunan tersebut diberikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan bekerja dengan maksimal dan akan berdampak pada adanya pemberian lapangan pekerjaan kepada masyarakat desa.

⁴ Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1

Dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait pembangunan desa, maka hal tersebut dapat digunakan masyarakat untuk merekatkan rasa kekeluargaan dan sikap gotongroyong antar sesama masyarakat. Kegiatan gotongroyong merupakan identitas yang melekat di masyarakat Indonesia. Selain itu, gotongroyong merupakan cerminan kepribadian masyarakat desa. Manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan gotongroyong salah satunya yaitu dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan. Dengan begitu, masyarakat juga dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pembangunan. Hal tersebut disebabkan masyarakat memperoleh bimbingan secara langsung dan dapat mempraktekan ilmu yang telah diperoleh.⁵

Masyarakat adalah orang yang mengetahui tentang kebutuhan yang diperlukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat adalah orang yang melakukan pembangunan secara partisipatif. Hal tersebut disebabkan masyarakat dapat memberikan aspirasi tentang kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dengan begitu, pemerintah harus memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan dari Pembangunan pedesaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, maka hal tersebut akan berdampak pada ketahanan nasional. Ketahanan nasional tersebut meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan.

⁵ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: 1996), 175.

Pengembangan pembangunan yang menyeluruh bagi desa dikerjakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tersebut perlu didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membangun desa. Hal lain yang perlu dibuktikan yaitu adanya aturan yang mengatur serta dapat mengarahkan masyarakat agar dapat melaksanakan program sesuai dengan program yang telah dirancang.⁶

Desa yang maju dapat dilihat dari infrastruktur yang dimiliki dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Unsur Infrastruktur tersebut terdiri dari meliputi pembangunan jalan, pembuatan lampu jalan, jembatan, sekolah, polindes dan perpustakaan dll. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 83 mengungkapkan, bahwa perpaduan pembangunan desa pada satu kabupaten adalah pembangunan Kawasan desa. Jika pembangunan tersebut terus dilakukan, maka usaha percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan desa akan berjalan dengan baik. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1. Menggunakan serta memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki oleh desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan kekuasaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan tata ruang yang dimiliki oleh Kabupaten atau Kota.

⁶ Jurnal Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara), April 2016.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Membangun infrastruktur, meningkatkan ekonomi perdesaan, dan mengembangkan teknologi yang tepat guna bagi masyarakat
4. Memberdayakan masyarakat Desa dengan tujuan untuk meningkatkan akses pelayanan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa bertugas untuk membuat rancangan yang sesuai dengan ketepatan yang sesuai dengan perencanaan. pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota meliputi pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dengan berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dimiliki oleh Daerah.⁷

Seperti halnya di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aturan Undang-Undang, pembangunan infrastruktur adalah hal yang wajib dilakukan bagi seluruh pemerintah desa dan masyarakat. peneliti ingin menganalisis implementasi kebijakan tentang pembangunan infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dan apa saja faktor yang menghambat dan mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Dengan berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang

⁷ Undang Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 83

berjudul “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan dalam penelitian ini sebagai Batasan masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Berikut ini Batasan masalah dalam penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam studi analisis terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada Batasan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin diperoleh peneliti di antaranya:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Studi Analisis terhadap Pembangunan Infrastuktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

dalam Studi Analisis terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat:

1. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah dan sebagai penerapan dari berbagai teori yang penulis dapatkan selama dalam masa perkuliahan.
2. Untuk kajian akademik terutama jurusan Ilmu Politik dalam studi kasus pembangunan infrastuktur di desa, adapun manfaat secara praktis, adalah :
 - a. Memberikan bahan masukan terutama kepada pemerintah di tingkat desa, dengan memberikan kajian tentang studi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kasus pembangunan infrastruktur di desa.
 - b. Memberikan acuan bagi para mahasiswa dan berbagai pihak terkait studi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kasus pembangunan infrastuktur di desa.

E. Definisi Konseptual

1. Implementasi

Sebuah kebijakan akan langsung diimplimentasikan ketika telah selesai dirumuskan. Jika proses kebijakan tersebut dibuat dengan baik atas dasar keperluan masyarakat, maka kebijakan yang telah dibuat akan memberikan dampak yang baik ketika

diimplementasikan.⁸ Usman menyatakan, bahwa ujung dari kegiatan implementasi yang dilakukan adalah kegiatan yang bernilai positif, tersusun dengan baik, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁹

Guntur mengungkapkan, bahwa implementasi ialah kegiatan yang membutuhkan Kerjasama yang baik baik melalui demokrasi atau tidak. Implementasi dikerjakan untuk mendapatkan interaksi yang sesuai dan menghasilkan tujuan yang efektif.¹⁰

Hanifah berpendapat, bahwa kegiatan yang dilakukan dengan berlandaskan pada kebijakan yang telah dibuat dalam kegiatan administrasi. Tujuan dari mengembangkan perencanaan yang telah dibuat ialah untuk memaksimalkan rencana yang telah dibuat.¹¹

Berdasarkan pemaparan tersebut, implementasi merupakan sebuah cara untuk mengerjakan sebuah kebijakan. Implementasi juga telah dirancang untuk dapat diterapkan melalui kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, implementasi terhadap kebijakan yang telah direncanakan juga memerlukan obyek penunjang. Obyek tersebut berperan sebagai pendukung dalam kegiatan implementasi yang dikerjakan.

⁸Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 295

⁹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Grasindo. 2002), Hlm. 70

¹⁰Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2004), Hlm 39

¹¹Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya. 2002), Hlm. 67

2. Kebijakan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan gagasan yang telah dibuat dengan perencanaan yang baik. Kebijakan tersebut biasanya berada pada kepemimpinan, pekerjaan, yang mengatur seseorang tentang bagaimana cara bertindak. Leo Agustino mengutip penjelasan kebijakan menurut Carl J. Federick.¹² Carl berpendapat, bahwa kebijakan adalah kegiatan yang dianjurkan oleh seseorang atau organisasi yang dapat mengatur kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Solichin mengungkapkan bahwa definisi kebijakan terdiri dari beberapa, antara lain:

- a. Keputusan yang baik diambil berdasarkan kebijakan yang telah dibuat.
- b. Administrasi yang telah dibuat untuk sebuah kebijakan tidak dapat mempengaruhi kebijakan
- c. Perilaku dan harapan yang dimiliki individu merupakan bagian dari kebijakan
- d. Tindakan yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh individu merupakan bagian dari
- e. Pencapaian yang telah direncanakan merupakan bagian dari kebijakan
- f. Tujuan yang dipaparkan secara terang-terangan dan tersembunyi merupakan bagian dari kebijakan.

¹²Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm. 7

- g. Proses yang Panjang biasanya dilewati untuk membuat sebuah kebijakan.
- h. Hubungan antar organisasi dan negara merupakan bagian dari kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan.

Secara harfiah implementasi kebijakan ialah usaha yang dilakukan yang berkaitan dengan keputusan yang mengacu pada Undang-Undang.¹³ Van Meter dan Van Horn berpendapat, bahwa¹⁴ Implementasi kebijakan merupakan cara yang dilakukan sebagai batasan bagi individu dan organisasi. Cara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dapat melaksanakan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan baik oleh individu, maupun organisasi dengan mengerjakan kesepakatan yang telah disepakati.

4. Undang-Undang

Undang-Undang ialah hukum yang dibuat secara jelas dan mendetail yang sudah dapat diterapkan oleh masyarakat. Undang-Undang (*Formell Gesetz*) berisi tentang hukuman social, hukum pidana dan hukum paksa. Lembaga legislative adalah organisasi

¹³Abdul Aziz, *Implementasi kebijakan Publik Studi tentang kegiatan pusat infrmasi pada dinas komunikasi dan informatika provinsi sumatera utara*, volume 3 Nomor 1 , Juni 2013, hlm. 4

¹⁴Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Presindo, 22002), Hlm. 102

yang bertugas untuk membuat dan mengesahkan Undang-undang (*Formell Gesetz*).¹⁵

Rancangan Undang-Undang adalah nama yang diberikan sebelum Undang-Undang disahkan. Fungsi Undang-undang antara lain sebagai otoritas, aturan, anjurkan, menyediakan (dana), hukuman, memberikan, mendeklarasikan, serta batasan sesuatu.¹⁶ Oleh karena itu, Undang-Undang adalah landasan hukum yang dibuat dengan jelas dan mendetail bagi sebuah Lembaga. Undang-Undang tersebut dibuat oleh [pihak legislative dan dapat diterapkan oleh masyarakat.

5. Pembangunan

Pembangunan ialah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan dan situasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kondisi yang baik dan stabil.¹⁷ Pembangunan ialah upaya yang dilakukan Lembaga dan individu dengan terus menerus agar mendapatkan perbagian disetiap pembangunan yang dilakukan.¹⁸

Rogers menyatakan, bahwa pembangunan adalah usaha yang dikerjakan untuk dapat memberikan perubahan secara social dengan melibatkan individu yang banyak. Hal tersebut dapat

¹⁵ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18.

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang> di akses pada 9 Mei 2019

¹⁷ RiyadidanDeddySupriyadiBratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT.GramediaPustakaUtama, 2005), 14.

¹⁸ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 4.

mempengaruhi kegiatan pembangunan.¹⁹ Pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara terseteruktur dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.²⁰ Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pembangunan ialah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang berdampak pada kegiatan social. Kegiatan pembangunan tersebut dikerjakan dengan perencanaan yang matang dan dieksekusi dengan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati.

6. Infrastruktur

Infrastruktur ialah usaha yang dibuat pemerintah sebagai poros yang berperan pada bidang ekonomi. Infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah dapat membangun ekonomi pada sector nasional dan daerah. Jika infrastruktur dilihat secara makro berdasarkan tersedianya barang dan jasa, maka infrastruktur tersebut dapat memberikan pengaruh pada marginal capital. Selain itu, jika infrastruktur dibuat dengan baik, maka infrastruktur tersebut akan memberikan dampak yang besar pada usaha di tingkat mikro. Keuntungan yang diperoleh pengusaha mikro yaitu adanya pengurangan pada biaya produksi yang dilakukan.²¹

Grigg mengungkapkan, bahwa infrastruktur adalah sebuah rencana yang dibuat secara tersusun dengan baik yang dapat dilihat

¹⁹ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 12.

²⁰ *Ibid*, Ginanjar, 1996.

²¹ Kwik Kian Gie. 2002. *Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman*. Materi Kuliah Disampaikan Pada Studium General Institut Teknologi Bandung. Bandung.

dan dirasakan manfaatnya. Selain itu, pemanfaatan infrastruktur yang telah dibuat oleh pemerintah harus sanggup untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara ekonomi dan social. Infrastruktur dalam sebuah pemerintahan berperan sebagai sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat sebagai penunjang kebutuhan yang diberikan pemerintah.²² Infrastruktur tersebut menjadi investasi yang dibuat oleh pemerintah untuk membentuk modal ekonomi yang baik bagi segala lini perekonomian.²³

Kodoatie mengungkapkan, bahwa infrastruktur adalah unsur yang dibuat secara terencana dan dapat dilihat serta dirasakan secara langsung. Infrastruktur yang dibuat juga dapat memberikan dampak positif bagi pengguna dan pembuat infrastruktur tersebut.²⁴

Mengutip peraturan yang dikeluarkan oleh presiden No. 42 Tahun 2005 berkaitan dengan komite percepatan penyediaan infrastruktur menyatakan, bahwa terdapat beberapa macam infrastruktur yang harus dimiliki dan disediakan pemerintah, antara lain infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur

²²Kodoatie, Robert J. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

²³ Mankiw, N. Gregory, *Pengantar Ekonomi-Ed.2*, (Jakarta: Erlangga, 2003).

²⁴*Ibid*, Kodoatie, 2005.

telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi.²⁵

Infrastruktur merupakan fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fasilitas fisik dapat berupa jalan, transportasi, air, manajemen limbah, bangunan dan fasilitas olahraga, serta produksi dan distribusi energi.

7. Desa

Desa adalah tempat awal dimana seseorang tinggal dan hidup secara menetap. Desa juga sering dikaitkan dengan istilah tempat leluhur berada atau berasal yang mengajarkan tentang norma, budaya dan kehidupan bermasyarakat yang baik. Perbedaan antara desa dan kota secara konsep terletak pada karakteristik pada masing-masing wilayah.²⁶

Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berkaitan dengan desa menyatakan, bahwa desa ialah gabungan dari beberapa desa yang telah diatur dan telah memiliki Batasan bagi wilayah masing-masing. Batas tersebut dibuat untuk memudahkan pemerintah pada desa tersebut untuk mengatur dan membuat kebijakan sesuai dengan wilayah yang telah dibuat. Kebijakan

²⁵ Jurnal, pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia, oleh Rindang bangun prasetyo dan Muhammad firdaus, 2009.

²⁶ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 226.

tersebut meliputi aturan tentang adat yang dimiliki, rencana jangka Panjang dan system pemerintahan yang akan dibuat dan terapkan.²⁷

Bintarto berpendapat, bahwa desa ialah wilayah yang dilihat berdasarkan batas wilayah yang dimiliki. Batasan tersebut berkaitan dengan cara hidup masyarakat dan karakteristik wilayah yang ditempati. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka sebuah desa akan memiliki cara social, cara politik, serta kultur yang berbeda abtar satu desa dengan desa lainnya.²⁸

Kuntjaraningrat menyatakan, bahwa desa merupakan kelompok organisme yang tinggal disuatu wilayah. Bargel berpendapat, bahwa desa adalah wilayah yang ditinggali oleh orang-orang yang bercocoktanam.²⁹

Desa merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki adat berbeda-beda, memiliki batas wilayah, memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, memiliki peraturan yang disepakati bersama warganya. Desa termasuk bagian penting dan kecil dari sebuah Negara, desa menjadi sumber adanya Negara bisa menjadi besar.

²⁷ Djuni Pristiyanto, *Buku 1: Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa-Cet.1*, (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015), 9.

²⁸ *Ibid*, Numan, 226.

²⁹ *Ibid*, Numan, 226-227.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada sebuah penelitian dibuat untuk dapat memperkuat penelitian yang telah dilakukan peneliti. Penguatan tersebut dapat dilihat dari teori yang dicantumkan oleh peneliti. Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Keterangan	Analisa
1	Sarpin	Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jl. Lettu Suyitno, No. 2, Kec. Bojonegoro. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)	Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro) Peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencanaan pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus dalam penelitian ini adalah: Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan dan Pelaksanaan kegiatan. Populasi adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Keseluruhan Masyarakat Desa Genjor Kecamatan Suguhwaras. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan cara purposive sampling yaitu menggunakan sampel bertujuan sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: Peran Kepala Desa Dalam Pembanguna Desa. Selain itu, peran kepala desa adalah sebagi motivator, fasilitator, dan innovator dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Terlihat bahwa Kepala desa sangat berperan aktif dalam penyelenggaraan komunikasi dengan masyarakat, Faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berdaya guna bagi masyarakat.
2	Deky Aji	Analisis Perencanaan	Analisis Perencanaan Pembangunan Desa

	Suseno dan St Sunarto	Pembangunan Desa Berbasis Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di KecamatanGunungpati Kota Semarang	Berbasis Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sampel yang diteliti, kelurahan telah melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014. Penentuan skala prioritas masih bervariasi, dan belum sepenuhnya mengikuti petunjuk pelaksanaan. Rencana pembangunan yang dihasilkan masih terpusat pada pembangunan fisik, belum ada pemerataan antar bidang. Anggaran yang diusulkan masih relatif cukup besar, sehingga dapat menimbulkan beban, dan ada kemungkinan ada beberapa program yang tidak dapat dibiayai pada tahun yang bersangkutan
3	Andi Asudin	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat	Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pelibatan masyarakat dalam proses Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2009 dan dampak yang ditimbulkan, serta data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk pembelajaran pada kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan menggunakan full populasi, yaitu: di sejumlah 25 desa sasaran PPIP Propinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur perdesaan sekalipun cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, namun masih rendah tingkat keberlanjutannya. Karena itu, dibutuhkan fokus perhatian proyek pada masa yang akan datang, seperti (1) meningkatkan aspek pengorganisasian masyarakat, (2) transparansi, dan (3) akuntabel, serta (4) berkelanjutan
4	Amni Zarkasyi Rahman dan Diyah Novitasari	Kebijakan Pembangunan Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan	Pembangunan menjadi salah satu isu yang selalu hangat untuk dibicarakan karena adanya dilema antara memacu pertumbuhan ekonomi atau mengejar pemerataan pembangunan. Terlebih lagi, selama hampir tujuh dekade pembangunan Indonesia cenderung jawa-sentris dan menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi kesenjangan yang tinggi antara pembangunan di Pulau Jawa dengan daerah-daerah lain, khususnya wilayah Indonesia Timur. Undang-Undang Nomor

			<p>6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Indonesia berubah arah yakni membangun dari pinggiran dan membangun dari desa. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan Indonesia dan mengejar ketertinggalan pembangunan desa dari kota. Dengan desa yang terbangun dan maju diharapkan akan mampu mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang merata. Tujuan dasar dari adanya infrastruktur transportasi yang efisien dan produktif adalah untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan pembangunan. Disamping itu, permintaan sektor transportasi itu sendiri cenderung tumbuh lebih jauh dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, urbanisasi dan sebagainya (Gramlich, 1994). Sehingga tidak heran bahwa pikiran awam menyebutkan perlunya infrastruktur transportasi sebagai fokus pertama pembangunan.</p>
5	Rahayu Sapta Nugraheni, Candra Fajri Ananda, Wildan Syafitri	Analisis Dampak Alokasi Anggaran Desa Dan Infrastruktur Desa Pada Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Semarang	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat kemiskinan desa di Kabupaten Semarang. Aspeknya adalah infrastruktur dasar yang terdiri dari pasar akses, akses kesehatan dan akses pendidikan, populasi, pendapatan asli desa, transfer pendapatan (dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan pajak dan bagi hasil retribusi daerah) dan alokasi belanja desa terdiri dari belanja pembangunan desa, belanja pengembangan masyarakat dan belanja pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap tingkat desa kemiskinan di Kabupaten Semarang. Aspek yang mempengaruhi tingkat kemiskinan ditunjukkan oleh Wald hasil tes adalah akses kesehatan, populasi, Pendapatan Asli Desa, alokasi pengeluaran pembangunan, alokasi pengeluaran pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah indikator kemiskinan tidak lagi berfokus pada ekonomi tetapi juga mengenai aspek struktural, kelembagaan, kesehatan dan kebijakan pemerintah. Pengembangan perencanaan perlu dilakukan dengan lebih baik sehingga anggaran.</p>

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini dicantumkan pada table di atas. Saat ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Program Pembangunan Infrastrukturi Desa (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo)*. Fokus penelitian terletak pada studi terhadap implementasi program pembangunan infrastruktur desa Wonoayu. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berkaitan dengan pembangunan desa akan menjadi dasar kajian yang akan dilakukan oleh peneliti. Undang-Undang tersebut berkaitan dengan cara implementasi dan hambatan yang diterima selama undang-Undang tersebut ada. Perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas yaitu informan penelitian adalah Kepala Desa Wonoayu dan penduduk desa Wonoayu.

B. Konsep Kebijakan Publik

Informasi terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat diterima masyarakat melalui berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut antara lain, surat kabar, majalah, stasiun tv, serta media elektronik lainnya. Informasi yang sering diberikan oleh sumber-sumber tersebut biasanya berkaitan dengan rancangan kebijakan, rapat tentang kebijakan yang telah dibuat, pemutusan kebijakan, dan pengesahan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat negara. Kebijakan pada sebuah hal ditentukan oleh isu yang mendukung kebijakan tersebut dibentuk.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan memiliki kesamaan dalam aspek posisi dan sudut pandang yang dapat menghasilkan respon. Sedangkan dalam pelaksanaannya kebijakan yang dibuat berada pada posisi dasar yang dapat mengatur setiap isu yang terjadi. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa implementasi yang dilakukan, observasi yang dikerjakan, dan penelitian yang dilakuakn oleh seseorang harus berdasarkan kebijakan yang sudah dibuat. Hal tersebut dilakukan untuk tetap mensinergikan antara tujuan dan pelaksanaan yang dilakukan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, pejabat pemerintah dapat melakukan pemerintahan dengan berdasarkan pada kebijakan yang telah dibuat.

Pada dasarnya pemilihan kebijakan sebagai landasan dasar terhadap kebijakan cukup tepat. Akan tetapi pemilihan tersebut harus didasarkan pada keadaan yang sedang dialami oleh individu. Hal tersebut disebabkan setiap individu memiliki focus dan pemilihan masing-masing. Secara literatur pengertian dari kebijakan public belum dapat dijelaskan secara pasti. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkadang tidak sejalan dengan orang yang menganalisis kebijakan tersebut.

Leslie A. Pal menjelaskan, bahwa terdapat kategori yang dapat mengelompokkan kriteria kebijakan. Kriteria kebijakan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu menitik beratkan pada tujuan yang ingin dicapai dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang telah dibuat. Kriteria pertama berkaitan dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah kepada

masyarakat. Sedangkan, kriteria kedua menitik beratkan pada sector dampak yang diterima masyarakat ketika kebijakan tersebut selesai dibuat dan diterapkan. Hal tersebut terjadi sebab masyarakat merupakan tujuan utama dari pembentukan kebijakan yang dibuat oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdampak baik dan positif bagi masyarakat.

Dye mengungkapkan, bahwa kebijakan public adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah baik itu dilakukan atau tidak dilakukan merupakan pilihan dari pemerintah itu sendiri. Edward III dan Sharkansky juga berpendapat, bahwa kebijakan public dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah diucapkan pejabat pemerintah dengan dilakukan atau tidak dilakukan. Hal tersebut tergantung pada tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan publik yang baik hendaknya melibatkan dan memberikan keuntungan yang baik kepada masyarakat.

Kartasmita berpendapat, bahwa kebijakan adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengerti serta menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan atau bahkan tidak dilakukan. Hal tersebut disebabkan pemerintah memegangkendali untuk dapat menerapkan atau tidaknya kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak positif dan dampak negative dari penerapan kebijakan yang telah diterapkan. Anderson dan Islamy mendefinisikan, bahwa kebijakan publik adalah cara yang dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan yang jelas dan

diterapkan oleh orang lain. Kebijakan tersebut diterapkan untuk membantu permasalahan yang telah dialami oleh kelompok.

Wahab mengutip penjelasan yang diberikan oleh Friedrich. Friedrich mengungkapkan, bahwa kebijakan adalah usaha yang dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan mendengarkan pendapat dari orang lain. Pendapat tersebut diperlukan guna mengkroscek apakah kebijakan yang dibuat telah patut dan cocok untuk diterapkan kepada masyarakat atau bahkan sebaliknya.

Anderson menyatakan, bahwa kebijakan publik adalah tanggapan yang diperoleh dari aturan pada bidang politik terhadap isu atau situasi yang ada di sekitar lingkup tersebut. Dengan berdasarkan hal tersebut, Dye menyatakan, bahwa terdapat tiga system kebijakan yang terdapat pada kebijakan publik. Ketiga system tersebut antara lain kebijakan public, orang yang terlibat dalam kebijakan, dan lingkungan kebijakan. David Easton mengungkapkan, bahwa kebijakan memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi.

Unsur-unsur tersebut antarlain, bahan yang akan diinput, proses, hasil dari proses yang telah dilakukan, timbal balik yang diterima dan lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan. Lingkungan intra dan lingkungan ekstra dimana orang dapat menentukan cara dan pilihan yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat merupakan jenis dari lingkungan kebijakan. Dalam kedua lingkungan tersebut terdapat tuntutan dan dukungan yang kemudian

mempengaruhi dan melahirkan hasil politik. Hasil politik tersebut dapat memberikan dampak yang baik, jika dilakukan dengan cara dan pemikiran yang positif. Selain itu, hasil politik tersebut juga dapat menimbulkan keuntungan apabila dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat.

Kedua lingkungan tersebut juga dapat menghasilkan aturan dan keputusan. Lingkungan yang menghasilkan aturan akan Kembali kepada masyarakat. Aturan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari keputusan yang telah dibuat.

Anderson dalam Islamy menyatakan, bahwa pengertian dari kebijakan memiliki beberapa unsur yang menjadi dasar dalam pengambilan pengertian tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy antara lain:

1. Kebijakan yang buat selalui berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat
2. Kebijakan berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengekseskusi rencana yang telah dibuat
3. Kebijakan merupakan kegiatan yang dirancang dan dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pejabat yang berwenang
4. Kebijakan publik memiliki nilai yang baik jika dilakukan dengan pertimbangan dan dapat bernilai negative jika tidak dilakukan dengan alasan yang dapat diterima tanpa dasar yang jelas

5. Kebijakan publik yang bersifat baik selalu dikerjakan dengan mengacu pada aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh pejabat yang berwenang.

Dengan mengacu pada unsur yang telah disebutkan oleh Anderson dalam Islamy, maka kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada dibidang pemerintahan. Kebijakan publik harus dibuat berdasarkan kenyataan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Permasalahan yang berada di masyarakat merupakan tujuan dibuatnya kebijakan oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan pemerintah bekerja untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang jelas dan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat merupakan permasalahan yang memiliki banyak jenis. Kebijakan publik tidak selamanya dapat langsung dibentuk. Kebijakan public yang dapat melibatkan banyak masa akan membuat pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan. Akan tetapi, jika permasalahan yang ada di masyarakat hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, maka pemerintah tidak perlu untuk mengeluarkan kebijakan publik. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya kebijakan public dibuat sebagai solusi yang dapat mencairkan permasalahan yang ada di masyarakat.

Dengan begitu dapat dikatakan, bahwa kebijakan public dibuat berdasarkan hal yang penting dalam membuat perencanaan kebijakan. Pembuatan kebijakan publik perlu memperhatikan beberapa hal, agar kebijakan yang dibuat dapat tepat sasaran kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut juga tidak merugikan masyarakat pengguna kebijakan publik. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah harus memperhatikan beberapa unsur, antara lain pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat rumusan kebijakan, pejabat yang berwenang untuk memberikan penetapan, pejabat yang bertugas untuk melaksanakan, dan petugas yang melakukan pengawasan serta memberikan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan pejabat dengan kebijakan public yang telah dibuat.

Wilson menyatakan, bahwa pemerintah dalam kebijakan memiliki dua peran yang sentral, yaitu pemerintah sebagai kelompok yang berperan dalam kegiatan politik dan pemerintah yang berperan sebagai administrasi pemerintahan. Keinginan negara kedepannya dapat dipengaruhi oleh fungsi politik yang terjadi. Sedangkan fungsi administrative berperan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah dibuat berdasarkan situasi politik dan dijalankan oleh fungsi administrative negara yang sesuai. Akan tetapi karena administrasi negara tidak memiliki hak untuk menjalankan kebijakan politik, maka perilaku politisi membuat kebijakan

public. Hal tersebut dilakukan kebijakan politik tidak memiliki kebebasan untuk mendeskripsikan sebuah kebijakan secara bebas. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut harus berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika kebijakan tersebut belum dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan, maka kebijakan tersebut dapat direvisi dan diperbaharui sesuai dengan tujuan yang seharusnya. Selain itu, pengontrolan kebijakan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan harus tetap dikontrol dengan tujuan untuk tetap menjaga keutuhan dan tujuan dari pembentukan kebijakan itu sendiri.

C. Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn

Teori Meter dan Horn digunakan untuk menganalisis masalah yang ingin diteliti oleh peneliti. Subarsono menuliskan pendapat Meter dan Horn yang menyatakan, bahwa terdapat beberapa factor yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja implementasi kebijakan yang telah dibuat. Factor yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut, diantaranya karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, tolak ukur penilaian dan sasaran kebijakan yang telah dibuat, hubungan antar sub bagian, sumber daya manusia, dan keadaan social, politik dan ekonomi sebuah negara atau pemerintah. Berikut ini factor yang ditinjau untuk menentukan kebijakan:³⁰

³⁰Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 99

1. **standar dan sasaran dari kebijakan** yang dibuat harus memiliki kejelasan yang dapat mengukur keakuratan kebijakan yang telah dibuat agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kebijakan yang telah dibuat.
2. **Karakteristik agen pelaksana** ialah aturan yang meliputi tatacara birokrasi, asas dan norma kebijakan, serta hubungan yang terjalin pada kebijakan yang telah dibuat.
3. **Hubungan antar-organisasi** ialah hubungan yang dibentuk dan terjalin dengan baik dengan organisasi lain dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan serta relasi yang baik dalam membuat dan menerapkan kebijakan.
4. **Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.** Digunakan untuk melancarkan implementasi kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan tersebut meliputi kondisi perekonomian wilayah kebijakan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kebijakan yang telah dibuat. Kondisi social masyarakat juga dapat mendukung serta mensukseskan kebijakan yang telah disetujui. Hal tersebut dapat dilihat dari cara pandang dan karakteristik masyarakat wilayah tersebut.
5. **Sumberdaya.** Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, jika kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mendapatkan dukungan masyarakat luas. Selain masyarakat, dukungan lain dari

kesuksesan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh wilayah atau sumber daya alam yang dimiliki.

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Edward berpendapat, bahwa terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain komunikasi yang dilakukan ketika kebijakan diterapkan, pemberian arahan yang jelas ketika kebijakan diimplementasikan, konsistensi ketika kebijakan dilakukan, dan aturan yang mengikat ketika kebijakan tersebut diterapkan. Komunikasi yang baik harus tetap terjalin dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penyampaian dalam berkomunikasi juga harus diberikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Jika komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, maka resiko miskomunikasi antar pelaksana kebijakan akan meningkat. Oleh karena itu, komunikasi antar pelaksana kebijakan harus berjalan dengan baik.

Faktor yang telah dipaparkan di atas dapat memberikan pengaruh kepada implementasi kebijakan. Hal tersebut disebabkan setiap factor memiliki kesinambungan antara satu sama lainnya. Selain itu, hubungan antar factor juga tidak dapat di satukan begitu saja. Hal tersebut disebabkan setiap factor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan memiliki kecocokan yang tidak terikat. Selain itu, jika salah satu dari keempat factor tersebut mengalami perubahan, maka factor

lainnya juga dapat mengalami perubahan terhadap implementasi kebijakan yang telah dibuat.

Hogwood dan Gunn mengatakan, bahwa jika keempat factor tersebut dapat berkolaborasi dan menghasilkan implementasi yang baik, maka Langkah yang dapat diambil setelahnya yaitu adalah menggunakan model *The Top Down Approach*. Untuk dapat menerapkan model the top down approach, maka harus memenuhi kriteria, yaitu lingkungan luar yang sedang diteliti tidak memperoleh dampak negative, adanya waktu, sumber daya manusia, dan sumberdaya alam yang mencukupi dan mendukung kegiatan tersebut, kolaborasi yang menggabungkan SDM, SDA, dan waktu yang memadai serta dapat menghasilkan capaian baru.

Kriteria yang harus terpenuhi berikutnya yaitu adanya hubungan symbiosis mutualisme ketika implementasi kebijakan tersebut ditetapkan, adanya hubungan yang bersifat kausal dengan melibatkan sedikit jalan untuk orang lain dapat bergabung, adanya hubungan meminimalisir ketergantungan ketika pelaksanaan tersebut, memahami tujuan dan perjanjian yang telah dibuat serta tugas yang akan dijalankan, adanya komunikasi dan tetap menjalin koordinasi yang baik antar pelaksana.

Dengan berdasarkan model tersebut, maka akan menghadirkan jenis tipologi kebijakan yang baru. Jenis tipologi tersebut dapat memiliki pengaruh yang dapat merubah jangkauan atau Batasan yang telah disepakati sebelum proses implementasi kebijakn tersebut dilakukan. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria yang memiliki hubungan satu sama

lain yang dapat menghasilkan timbal balik, antara lain asal kebijakan, besar dan tujuan dari kebijakana, ciri pelaksana implementasi kebijakan, adanya komunikasi dengan sub organisasi pelaksana implementasi kebijakan, attitude pelaksana implementasi kebijakan, dan wilayah implementasi kebijakan berdasarkan pada lingkup ekonomi, social dan politik.

Asal muasal sebuah kebijakan dibuat harus dimusyawarahkan dengan sub organisasi. Hal tersebut disebabkan tujuan dan batasan kebijakan yang dibuat harus memiliki kejelasan dan kesepakatan bersama. Setelah hal tersebut selesai dilakukan, maka pelaksana kebijakan baru dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat kepada masyarakat wilayah setempat. Sikap dan prestasi yang diperoleh oleh pelaksana tugas di sebuah wilayah dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, social dan politik wilayah tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Rulam menyatakan, bahwa pendekatan kualitatif merupakan sebuah cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang tidak membutuhkan peralatan statistic. Pendekatan kualitatif mengacu pada cerita hidup, sejarah dan tingkah laku individu. Konsep pendekatan kualitatif tidak memerlukan bilangan angka dalam proses pengerjaannya. Akan tetapi penelitian kualitatif lebih mendeskripsikan tentang situasi yang ditemukan peneliti ketika di lapangan. Proses pengambilan judul yang dilakukan peneliti diambil melalui penemuan fenomena yang ada di lapangan tempat penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.³¹

Kritis rasional dipilih sebagai jenis penelitian dalam penelitian ini. Pendekatan ilmiah digunakan dalam penelitian digunakan sebagai cara berpikir kritis rasional yang bersifat pembaharuan. Kemampuan manusia dalam berfikir menjadi pilihan akal dan budi pekerti individu. Dengan begitu dapat dikatakan, bahwa aktivitas kebatinan manusia juga dapat dilakukan dengan cara berfikir. Proses berpikir rasional seorang individu dapat dilakukan dengan berpikir secara benar, menghubungkan pemikiran satu sama lain, memilih obyek berpikir serta mencari hubungan antara

³¹Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta Lar-Ruzz Media, 2014), 14.

masalah dan obyek berpikir yang dapat menghasilkan tesa dan antitesa pada saat yang bersamaan.³²

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya berlokasi di Jl. Raya Wonoayu No. 83 Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Kode Pos 61261. Lokasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakan penelitian. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposif, artinya didasarkan atas pertimbangan tujuan penelitian. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut dengan tujuan mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

2. Waktu Penelitian

Waktu dalam membuat penelitian ditempuh selama 3 bulan dimulai pada bulan Agustus 2019 hingga Oktober 2019.

C. Pemilihan informan dan Pemilihan Objek Penelitian

1. Pemilihan Informan

³² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 6.

Pengambilan pemilihan informan dilakukan peneliti dengan cara mencari orang yang mengetahui tentang situasi yang ada di lapangan. Kemudian peneliti menghubungi calon informan tersebut. Dengan begitu, diharapkan peneliti dapat memperoleh informan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.³³ Metode *purpose sampling* diterapkan dalam penelitian ini. Pemilihan sampel dengan berdasarkan pada tujuan dan pertimbangan yang telah dibuat merupakan bagian dari *purpose sampling*.³⁴

Arikunto berpendapat, bahwa *purpose sampling* ialah cara yang digunakan peneliti dengan mempertimbangkan banyak aspek yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan dalam proses pengambilan data.³⁵ Dengan begitu maka, dapat dikatakan bahwa metode *purpose sampling* merupakan metode yang diperbolehkan untuk memilih informannya sendiri. Pemilihan informan tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan data yang diinginkan oleh masyarakat.

Pemilihan informan dilakukan peneliti dengan melibatkan judul penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pertimbangan peneliti juga mencari informan yang dapat menguasai judul penelitian yang akan dilakukan peneliti. Jika peneliti mendapatkan informan yang dapat terjun langsung dengan judul yang diambil peneliti, maka hal tersebut akan mempermudah peneliti untuk memperoleh informasi

³³Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: LAr-Ruzz Media, 2014), 92.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), 65.

³⁵Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Elkaf, 2005), 134.

yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan. Informan yang dicari oleh peneliti adalah informan yang telah terjun langsung dalam penerapan program pembangunan infrastruktur di desa Wonoayu, seperti; Kepala Desa Wonoayu, Pamong Desa, Kepala Sekolah TK dan PAUD Desa Wonoayu, masyarakat Desa Wonoayu. Menurut penulis subjek tersebut dapat berkontribusi dalam memberikan informasi maupun data pendukung penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dimana Kepala Desa sebagai yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan, memonitoring, serta melakukan evaluasi. Sedangkan Kepala Sekolah TK dan Paud dan masyarakat desa wonoayu sebagai penerima program pembangunan infrastruktur desa. Adapun informan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Supriyadi	Kepala Desa Desa Wonoayu
2.	Bapak Yasak	Kasun 2 Desa Wonoayu
3.	Bapak Yus	Carik Desa Wonoayu
4.	Ibu Juliati Dwi Putra	Kepala Sekolah PG PAUD Anggrek Wonoayu
5.	Ibu Musiati	Kepala Sekolah TK Dharmawanita 2 Wonoayu
6.	Ibu Lilin/Anis	Kader PKK
7.	Bapak Naim	Sesepuh Desa Wonoayu

2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek penelitiannya meliputi :

- a. Penerapan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang Pembangunan Desa terkait Implementasi Program Pembangunan infrastruktur di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- b. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

D. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini, penulis menggali informasi tentang Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sebagai akses data awal penulis menggali informasi kepada informan terkait, kemudian menyusunnya menjadi latar belakang dan rumusan masalah. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pra lapangan ini adalah:

- a. Menyusun rancangan penelitian yang berupa penyusunan proposal penelitian.
- b. Sebelum menyusun proposal penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

c. Kemudian setelah proposal penelitian dibuat penulis membuat surat pengajuan untuk perijinan kepada bakes bangpol selalu dinas yang akan mengeluarkan perijinan yang selanjutnya akan ditujukan pada pihak kantor kepala Desa Wonoayu.

2. Tahap Lapangan

a. Wawancara Mendalam

Selanjutnya penulis akan melakukan interview atau wawancara secara mendalam dengan informan yang tepat agar diperoleh data yang valid. informan adalah Kepala Desa di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang bertanggungjawab dalam proses pengimplentasian program pembangunan infrastruktur di desa wonoayu, perangkat desa wonoayu, kemudian yang terakhir adalah masyarakat desa wonoayu.

b. Pengumpulan Dokumen

Setelah interview atau wawancara dilakukan, penulis akan mengumpulkan informasi yang telah didapat serta mencocokkannya dengan data yang telah ada dilapangan guna mengkorelasikan beberapa informasi yang dibutuhkan yang selanjutnya akan dilakukan analisa data.

c. Menyusun Laporan

Kemudian setelah mendapat informasi dari wawancara dan dilakukan tahap analisis data, penulis akan segera menyusun laporan yang akan disusun menggunakan format yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

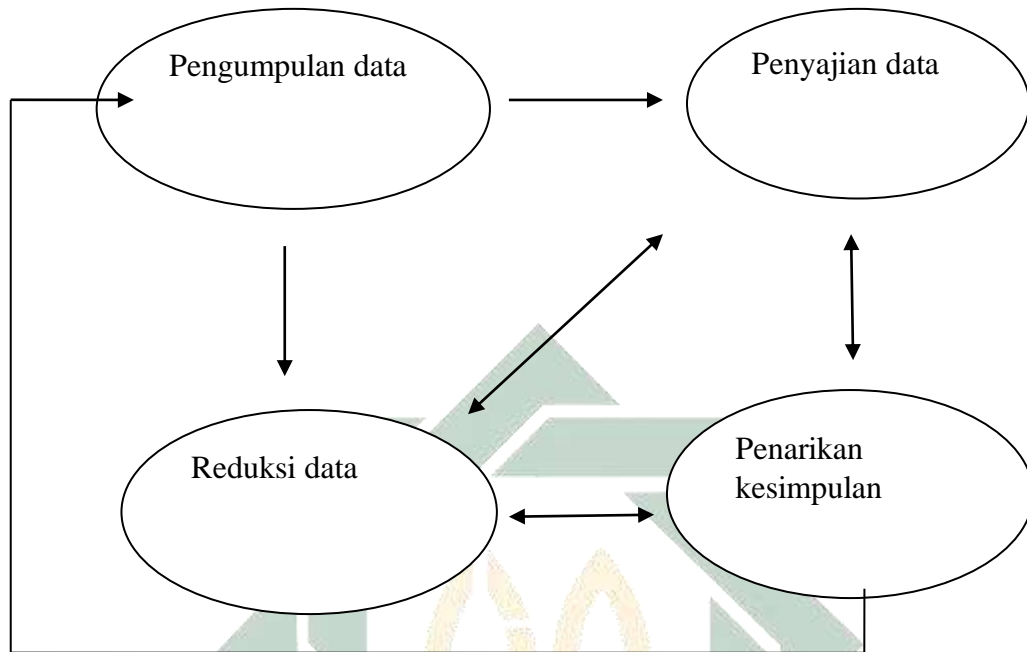
Teknik pengumpulan kualitatif dipilih dalam penggunaan penulisan penelitian ini. Penelitian kualitatif memiliki beberapa Teknik, antara lain observasi, wawancara, life history, dokumentasi, catatan penelitian, dan media.³⁶ Penelitian ini dikerjakan dengan Teknik pengumpulan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat, bahwa kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis secara langsung dan melibatkan dialog interaktif dengan informan. Hal tersebut dilakukan hingga penelitian yang dilakukan selesai dilakukan.⁴⁶ kegiatan yang dilewati ketika melakukan analisis data dalam penelitian, yaitu:

³⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),143.

Model Analisis Interaktif Miles and Hubberman



Sumber : Sugiyono 2007

Model interaktif Miles dan Hubberman dipilih sebagai Teknik analisis data pada penelitian ini.

1. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data ialah mencari hal-hal pokok yang dapat digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh jenis data yang akurat dan sesuai dengan judul penelitian yang telah dipilih. Selain itu, jika data yang penting telah dikumpulkan dan dipisahkan, maka peneliti akan memperoleh data penelitian yang akurat dan dapat mempermudah pekerjaan berikutnya. Temuan yang ada di lapangan akan menjadi focus yang akan dimasukkan dalam reduksi data. Setelah itu, peneliti akan

mengkaji dan membandingkan penyebab terjadinya impelmentasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 78 tentang pembangunan Desa terselenggara dengan baik ataupun tidak di lapangan.

2. *Penyajian Data (Data Display)*

Miles dan Hubberman mengatakan, bahwa penyajian data ialah informasi yang dirancang untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data. Dengan begitu, peneliti dapat melihat data mana yang sesuai dan fakta yang sesuai dengan di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memberikan dan menuliskan kejadian dan fakta yang ada di lapangan. Dengan begitu, maka peneliti melakukan penelitian dengan melibatkan gambaran umum lokasi penelitian mulai dari gambaran umum Kabupaten Sidoarjo, Desa Wonoayu. Tidak hanya itu penulis juga melengkapinya dengan profil Desa Wonoayu dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang pembangunan Infrastruktur Desa.

3. *Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/verification)*

Miles and Huberman menyatakan, bahwa penarikan kesimpulan ialah hasil yang diperoleh dari penyajian data yang telah dibuat oleh peneliti. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti harus menunjukkan kebenaran yang memuat fakta yang ada di lapangan tempat penelitian dilakukan.

Kesimpulan dalam penelitian ini didapat peneliti dengan mereduksi data berdasarkan kebenaran Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Program Pembangunan Infrastruktur Desa. Selain itu, kesimpulan dalam penelitian ini juga dapat diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan. Setelah mendapatkan data dan fakta di lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Desa ini perlu adanya monitoring dan evaluasi terkait dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas desa yang tidak maksimal dan tidak perhatian dari pemerintah setempat, tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi data digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kevaliditasan data yang telah diperoleh peneliti. Triangulasi data juga merupakan Teknik yang digunakan untuk mengkresek kebenaran data yang telah ditemukan peneliti.³⁷ Hal tersebut disebabkan penelitian kualitatif selalu menjaga kebenaran data yang telah disajikan dalam penelitian. Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan peneliti memerlukan pengecekan Kembali guna meminimalisir adanya kejanggalan data penelitian

³⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif disikdua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 257.

Sugiyono mengatakan, bahwa uji kredibilitas data memiliki beberapa jenis, yaitu pengamatan yang Panjang, meningkatkan ketekunan peneliti, triangulasi dan melakukann pengecekan Kembali.³⁸

Triangulasi data ialah teknik pengumpulan data yang menyatukan beberapa data yang telah diperoleh selama penelitian. Triangulasi teknik ialah Teknik yang dilakukan dengan menggabungkan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.³⁹

Gabungan antara hasil penelitian melalui Teknik observasi, Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi digunakan dalam penlitian ini. Pengujian kebenaran data dengan teori dan hasil penelitian merupakan triangulasi data.⁴⁰ Berikut ini Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan triangulasi data:

- a. Peneliti memadumadankan hasil wawancara, dengan hasil observasi dan dokumentasi.
- b. Peneliti menyinkronisasikan informasi yang diberikan narasumber dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dengan data apa sudah sesuai atau tidak.
- c. Membuat perbandingan antara informasi yang diberikan satu narasumber lainnya.
- d. Membandingkan wawancara dengan isi dokumen.

³⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 27.

³⁹Ibid, hal. 83.

⁴⁰ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal 264

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima babmulai dari BAB I PENDAHULUAN sampai dengan BAB V PENUTUP. Lebih jelasnya akan penulis paparkan sebagaimana dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual.

BAB II KAJIAN TEORITIK yang berisi tentang penelitian terdahulu, kajian pustaka yang terdiri dari Undang-undang No.6 Tahun 2014, kemudian teori-teori implementasi kebijakan

BAB III METODE PENELITIAN yang meliputi, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan sistematika pembahasan.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHSANA yang berisi penyajian dan analisis data dan akan menyajikan hasil data lapangan serta analisis terhadap Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonoayu, serta temuan penelitian di lapangan.

BAB V PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai, yakni sungai Surabaya dan Sungai Porong. Sehingga menjadikan Sidoarjo dikenal dengan kota Delta. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7, 3' dan 7, 5' Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan 71. 424,25 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut. Kabupaten Sidoarjo memiliki wilayah dengan karakteristik tersendiri, karakteristik yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo terbagi ke dalam tiga wilayah. Pertama, daerah dengan prosentase 40,81% merupakan daerah yang terletak di bagian tengah dan berair tawar. Kedua, daerah yang berada pada di sisi timur yang merupakan daerah pantai dan pertambakan dengan prosentase 29,99%. Terakhir dengan daerah yang terletak di bagian barat yang mempunyai prosentase wilayah sebesar 29,20%.

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik
- 2) Sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan

- 3) Sebelah timur adalah Selat Madura
- 4) Sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.

b. Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi dalam 322 desa dan 31 kelurahan. Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo, wilayah yang paling luas terdapat di kecamatan Jabon (81,00 km²) dan Sedati (79,43 km²). Akan tetapi dua kecamatan yang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidoarjo, daerahnya didominasi oleh pertambakan, sehingga kepadatan penduduk bisa dibilang relatif kecil. Sedangkan 16 kecamatan lainnya mempunyai wilayah hampir rata-rata sama, luas rata-rata tiap kecamatan itu yakni 34,61 km².

Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Kecamatan Sidoarjo	194,051 KM ²
2.	Kecamatan Buduran	92,334 KM ²
3.	Kecamatan Candi	145,146 KM ²
4.	Kecamatan Porong	65,909 KM ²
5.	Kecamatan Krembung	58,358 KM ²
6.	Kecamatan Tulangan	87,422 KM ²
7.	Kecamatan Tanggulangin	84,580 KM ²
8.	Kecamatan Jabon	49,989 KM ²
9.	Kecamatan Krian	118,685 KM ²
10.	Kecamatan Balongbendo	66,865 KM ²
11.	Kecamatan Wonoayu	72,009 KM ²
12.	Kecamatan Tarik	60,977 KM ²
13.	Kecamatan Prambon	68,336 KM ²
14.	Kecamatan Taman	212,857 KM ²
15.	Kecamatan Waru	231,298 KM ²
16.	Kecamatan Gedangan	132,847 KM ²
17.	Kecamatan Sedati	92,468 KM ²
18.	Kecamatan Sukodono	111,121 KM ²
JUMLAH		1,945,252 KM ²

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo 2018

c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Sidoarjo	95.885	98.166
2.	Buduran	92.334	46.901
3.	Candi	72.283	72.863
4.	Porong	33.771	32.138
5.	Krebung	29.183	29.175
6.	Tulangan	43.982	43.440
7.	Tanggulangin	42.279	42.301
8.	Jabon	24.966	25.023
9.	Krian	59.899	58.786
10.	Balong Bendo	33.633	33.232
11.	Wonoayu	36.017	35.992
12.	Tarik	60.977	30.362
13.	Prambon	68.336	34.063
14.	Taman	107.256	105.601
15.	Waru	116.242	115.056
16.	Gedangan	67.757	65.090
17.	Sedati	46.805	45.663
18.	Sukodono	55.936	55.185
JUMLAH		977.683	967.569

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo 2018

Dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang tersebar dalam 18 Kecamatan dapat di ketahui jumlah penduduk yang terdapat di 49 Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.945.252, yang terdiri dari laki-laki 977.683 dan perempuan 967.569 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Waru dengan jumlah 231.298 jiwa, sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Jabon dengan jumlah penduduk 49.989 jiwa.

d. Aspek Keuangan Kabupaten Sidoarjo

Tabel 4.3
Keuangan kabupaten Sidoarjo

Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.431.052.747.437,41
Dana Perimbangan	Rp. 1.834.890.492.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	Rp. 791.025.010.500,00

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2018

e. Aspek Pendidikan

Dalam Publikasi Sidoarjo Dalam Angka, kegiatan pendidikan yang dicakup adalah kegiatan pendidikan formal baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional dan di luar departemen tersebut, yaitu di bawah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan dan departemen lainnya. Kegiatan pendidikan meliputi banyaknya sekolah, murid dan guru dirinci menurut jenjang/ tingkatan yaitu SD, SMP, SMA dan Sekolah Kejuruan. Sarana fisik pendidikan merupakan penunjang utama dalam proses belajar mengajar, khususnya jumlah sekolah yang tersedia dan banyaknya guru. Tahun ajaran 2017 jumlah SD sebanyak 558, terdiri dari 468 SD Negeri dan 90 SD Swasta. Jumlah SD Negeri mengalami penurunan disebabkan adanya merger SD. Sedangkan jumlah SLTP Negeri tidak mengalami penambahan, akan tetapi jumlah SLTP Swasta mengalami penambahan sebanyak 5 sekolah. Jumlah SMU Negeri dan Swasta mengalami penambahan sebanyak 1 sekolah dan 5 sekolah. Jumlah SMK Swasta juga mengalami penambahan sebanyak 1 sekolah.

Hal lain yang cukup menarik untuk diulas adalah perguruan tinggi. Di Sidoarjo ada 14 perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah yang terletak di Kecamatan Sidoarjo mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Sidoarjo terdapat 7 perguruan tinggi yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu Poltekkes-Kemenkes, Akper-Kerta Cendikia, Akbid-Siti Khodijah, Akbid-Mitra Sehat, Stikes Insan Unggul, Akbid-Wahana Sehat dan Akademi Analisis Kesehatan YPM. sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Sekolah Dasar		SMP/SLTP		SMA/SLTA		SMK	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sidoarjo	35	17	6	19	4	12	1	14
Buduran	19	2	3	6	1	2	3	3
Candi	26	3	3	4	-	1	-	1
Porong	23	3	3	7	1	5	-	4
Kremlung	26	3	2	3	1	-	-	4
Tulangan	31	4	1	6	-	2	-	8
Tanggulangin	22	6	2	5	-	2	-	2
Jabon	22	-	3	3	-	1	1	3
Krian	30	10	3	11	1	6	-	5
Balongsendo	25	1	2	3	-	2	-	2
wonoayu	30	-	2	3	1	1	-	1
Tarik	29	2	2	4	1	1	-	3
Prambon	27	-	1	4	-	1	-	2
Taman	39	9	3	14	1	6	-	9
Sukodono	23	7	2	3	-	2	-	3
Gedangan	21	5	2	5	1	4	-	3
Waru	23	16	4	16	1	5	-	6
Sedati	17	2	2	6	-	3	-	2

Sumber: Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2018

f. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa agama sebagaimana agama yang diakui oleh Negara. Keberagaman masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tersebar di 18 kecamatan

yang masing-masing agama itu memiliki penganut tersendiri. Beberapa agama yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan jumlah pemeluknya terdiri dari; Pertama, agama Islam dengan jumlah pemeluk 1.786.226 jiwa. Kedua, agama Kristen dengan jumlah pemeluk 36.092 jiwa. Ketiga, agama katolik dengan jumlah pemeluk 19.750 jiwa. Keempat, agama Hindu dengan jumlah pemeluk 3.958 jiwa. Kelima, agama Budaha dengan jumlah pemeluk 3.775 jiwa. Keenam, agama konghucu dengan jumlah pemeluk 232 jiwa. Uraian singkat diatas, memberikan gambaran pada kita bahwa jumlah agama berdasarkan penganutnya yang paling banyak terdapat pada agama islam. sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Agama

Kecamatan	Islam	Kristen	hindu	Konghucu	Budha	katolik
Sidoarjo	153.979	8.926	542	36	995	4.282
Buduran	178.944	1.705	135	7	178	828
Candi	114.804	4.267	507	-	214	742
Porong	80.187	625	153	1	73	73
Krembung	63.537	223	18	-	7	77
Tulangan	79.169	209	5	2	-	60
Tanggulangin	73.074	380	14	-	5	98
Jabon	55.090	32	1	-	-	10
Krian	86.429	506	33	139	148	613
Balong bendo	60.772	543	22	-	15	147
wonoayu	76.821	209	5	-	8	26
Tarik	61.610	350	2	-	-	357
Prambon	77.295	978	42	-	-	159
Taman	173.254	5.878	841	47	500	3.855
Waru	178.019	6.648	1124	-	962	4.799
Gedangan	101.538	2.661	279	-	541	1.873
Sedati	80.607	1.740	118	-	54	963
Sukodono	91.097	212	117	-	75	788
Jumlah	1.786.226	36.092	3.958	232	3.775	19.750

Sumber Dda: Kabupaten Sidoarjo 2012, 176.

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Sebab dari jumlah penduduk yang berjumlah 1.850.033 jiwa, 1.786.266 beragama Islam. Disamping agama Islam menjadi agama mayoritas masyarakat, Kabupaten Sidoarjo juga didukung dengan banyaknya pondok pesantren yang berada di wilayah ini³. Sebagai Agama (Islam) yang menjadi mayoritas masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, sehingga melahirkan banyak organisasi-organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan tersebut dimungkinkan sebagai sarana dalam menunjang mengaplikasikan agama di tengah masyarakat. Organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Sidoarjo tercantum sebagaimana tabel di bawah ini.

g. Aspek Kesehatan

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah tingkat kesehatan penduduk. Ketersediaan sarana prasarana fisik dan tenaga medis yang profesional merupakan salah satu indikator kesehatan penduduk. Pada tahun 2017, konsentrasi dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo lebih “intens” pada pelayanan yang lebih maksimal, yaitu penyebaran tenaga kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia mengalami peningkatan sebanyak 1.033 sarana naik sekitar 16,70 persen dibanding tahun 2016. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sidoarjo mencapai 8.567 orang. Tenaga kesehatan tersebut tersebar

di 18 kecamatan. Dengan penjelasan diatas peneliti juga membuat tabel jumlah Posyandu ang ada di Kabupaten sidoarjo yakni sebgai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Posyandu Menurut Strata dan Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Strata Posyandu				Jumlah	Posyandu Aktif
	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri		
Tarik	0	9	64	0	73	64
Prambon	0	25	42	8	75	50
Krembung	0	0	63	0	63	63
Porong	0	8	48	0	56	48
Jabon	6	15	21	8	50	29
Tanggulangin	0	0	77	1	78	78
Candi	0	8	146	4	158	150
Tulangan	0	5	69	20	94	89
Wonoayu	0	12	69	0	81	69
Sukodono	0	32	88	0	120	88
Sidoarjo	3	21	133	13	170	146
Buduran	0	3	78	2	83	80
Sedati	0	13	71	0	84	71
Waru	5	41	110	1	157	111
Gedangan	0	33	61	10	104	71
Taman	0	45	114	0	159	114
Krian	0	7	113	0	120	113
Balongsendo	0	24	42	0	66	42

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2018

h. Aspek Pertanian dan Peternakan

1) Aspek Pertanian

Kinerja positif sektor pertanian didukung oleh kondisi cuaca yang baik. Seperti diketahui, bahwa lahan sawah di Sidoarjo sekitar 90 persen nya merupakan lahan berpengairan teknis dengan kondisi topografi berdataran rendah, sehingga ketika curah hujan cukup, akan memicu kenaikan produktifitas tanaman. Dari luas lahan sawah 21.690 Ha, sepanjang Tahun 2018 (3 musim tanam),

tanaman padi telah menggunakan area tanam seluas 75 persen, tanaman tebu 13 persen dan palawija/hortikultura 12 persen. Dari seluruh tanaman yang menggunakan lahan sawah, ternyata sebagian besar tanaman pangan mengalami kenaikan produksi. Produksi padi mengalami kenaikan 0,92 persen, dari 2.058 ribu kuintal (2017) menjadi 2.078 ribu kuintal (2018). Produksi kacang hijau yang melimpah menghasilkan panen sebesar 21,5 ribu kuintal, meningkat 36,94 persen dari tahun sebelumnya (sebesar 15,7 ribu kuintal). Produksi tebu walaupun tidak banyak, namun masih terjaga diatas 3 ribu kuintal. Produksi tahun 2017 sebesar 3,1 ribu kuintal, naik sebesar 3,3 ribu kuintal (2018). Pada tahun 2018, untuk tanaman sayuran potensial produksinya mengalami kenaikan meliputi : sawi (46,25 persen), bayam (8,78 persen%) dan kangkung (23,81 persen). Sebagaimana tabel dibawah ini:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 4.7

Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan
(000 Kw)

Tanaman Utama	2016	2017	2018
Padi	2186,3	2058,9	2077,8
Jagung	6,8	11,8	12,8
Kedele	6,2	9,8	6,0
Kacang Hijau	16,1	15,7	21,5
Sawi	40,1	48,0	70,2
Bayam	32,4	37,6	40,9
Kangkung	14,9	37,8	46,8
Tebu	3,7	3,1	3,3

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam angka 2019

2) Aspek Peternakan

Ternak dibedakan atas ternak besar, ternak kecil dan unggas. Berdasarkan catatan Dinas Pangan dan Pertanian, jumlah ternak besar di Sidoarjo pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh menjamurnya usaha peternakan sapi perah. Jumlah sapi perah bertambah 207 ekor, begitu pula jumlah sapi potong bertambah 295 ekor. Kenaikan jumlah sapi perah dan sapi potong yang cukup besar berpengaruh terhadap harga susu perah dan daging yang beredar di pasar. Jenis populasi ternak kecil yang dominan di Sidoarjo adalah kambing dan domba yaitu 32.169 dan 30.369 ekor. Sedangkan kambing perah walaupun populasinya meningkat dari tahun lalu, namun populasinya masih sedikit yaitu 347 ekor lebih lanjut lagi dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Produksi Daging Menurut Jenis Ternaknya

Jenis Ternak/Unggas	2015	2016
Sapi	7.670.703	6.101.946
Kerbau	-	-
Kuda	-	-
Kambing	900.373	870.263
Domba	47.237	1.041.456
Babi	-	-
Ayam Kampung	2.494.800	2.502.142
Ayam Ras	2.840.060	2.984.500
Itik	1.422.000	1.410.185
Entok	112.000	6.449

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2017

i. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Tabel 4.9
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Dalam Jiwa)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	36.915
2.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	20.829
3.	Polisi Republik Indonesia (Polri)	15.870
4.	Swasta	310.338
5.	Pedagang	45.888
6.	Petani	29.826
7.	Pertukangan	12.848
8.	Buruh Tani	23.860
9.	Pensiunan	22.387
10.	Nelayan	17.598
11.	Pemulung	6.881
12.	Jasa	41.301
JUMLAH TOTAL		584.541

Sumber Dda: Kabupaten Sidoarjo 2012, 106.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui. Bahwa berdasarkan jenis pekerjaan suatu Kabupaten bisa kita peroleh suatu gambaran ekonomi dalam kabupaten tersebut. Jenis pekerjaan dalam Kabupaten Sidoarjo yang paling dominan dimiliki oleh sektor pekerjaan swasta. penduduk kabupaten Sidoarjo yang bergerak pada sektor swasta dimiliki oleh 310.338 jiwa. Sedangkan untuk peringkat kedua dimiliki oleh kelompok pedagang. Artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak yang bergerak dalam dunia perdagangan. Angka yang menunjukkan bahwa masyarakat sidoarjo bekerja dalam sektor perdagangan sampai 45.888. Peringkat ketiga sektor pekerjaan yang banyak dimiliki oleh kelompok masyarakat Sidoarjo adalah dalam sektor jasa.

2. Gambaran Umum Kecamatan Wonoayu

Wonoayu adalah sebuah kecamatan dikabupaten sidoarjo provinsi jawa timur. Wonoayu dilewati jalan provinsi yaitu jalan raya Wonoayu. Secara harfiah Wonoayu berasal dari bahasa jawa yang berarti Wono artinya Hutan dan Ayu artinya Indah. Kecamatan ini berada diwilayah Kabupaten Sidoarjo tepat diwilayah strategis diantara Kecamatan Krian dan Kecamatan Sidoarjo. Wonoayu terletak 4 km Barat Daya dari kota Surabaya.

Kecamatan wonoayu merupakan salah satu kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan merupakan wilayah kota Sidoarjo. secara administrative Kecamatan Wonoayu perbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Sukodono, sebelah timur Kecamatan Sidoarjo, sebelah selatan Kecamatan Tulangan, dan sebelah barat Kecamatan Krian.”

a. Visi Misi Kecamatan Wonoayu

- Visi : 1. Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan prima.

- Misi : 1. Menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik.
2. Menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
4. Mewujudkan situasi keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.
5. Serta situasi yang kondusif bagi iklim infestasi dunia usaha. Meningkatkan SDM aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal agar mampu menghadapi tantangan serta daya saing masa depan.

b. Jumlah Desa di Kecamatan Wonoayu

Tabel 4.10
Jumlah Desa di Kecamatan Wonoayu

No.	Nama Desa
1.	Becirongengor
2.	Candinegoro
3.	Jimbaran kulon
4.	Jimbaran wetan
5.	Karang puri
6.	Ketimang
7.	Lambangan
8.	Mojoarangagung
9.	Mulyodadi
10.	Pagerngumbuk
11.	Pilang
12.	Plaosan
13.	Ploso
14.	Popoh
15.	Sawocangkring
16.	Semambung
17.	Simoangin-angin
18.	Simoketawang
19.	Sumber rejo
20.	Tanggul
21.	Wonoayu
22.	Wonokalang
23.	Wonokasian

Sumber : Arsip Kantor Kecamatan Wonoayu

c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan

Wonoayu

Tabel 4.11
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Wonoayu

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Simoketawang	741	761	1502
2	Popoh	1449	1724	3173
3	Jimbaran Wetan	846	829	1675
4	Ketimang	1383	1627	3010
5	Pilang	2639	3097	5736
6	Sumberejo	1851	1911	3762
7	Mojorangagung	325	315	640
8	Wonokasian	2635	3094	5729
9	Ploso	1721	1993	3714
10	Jimbaran Kulon	629	742	1371
11	Wonoayu	1971	2314	4285
12	Semambung	1965	2303	4268
13	Simo angin-angin	1398	1649	3047
14	Tanggul	2261	2632	4893
15	Wonokalang	1347	1542	2889
16	Pagerngumbuk	1451	1721	3172
17	Plaosan	1513	1791	3304
18	Mulyodadi	1083	1010	2093
19	Lambangan	1580	1488	3068
20	Sawocangkring	1124	1494	2618
21	Becirongengor	2040	2372	4412
22	Karangpuri	2605	3006	5611
23	Candinegoro	1739	2016	3755
Jumlah		36296	41431	77727

Sumber: Kecamatan Wonoayu Dalam Angka 2017

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk di Kecamatan Wonoayu menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 36.296 dan perempuan sebanyak 41.431. data tersebut diperoleh dari kantor Kecamatan Wonoayu hasil perhitungan pada tahun 2017.

d. Aspek Agama

Tabel 4.12
Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Wonoayu

No	Desa/Kelurahan	AGAMA			
		Islam	Kristen/	Hindu/	Lain-lain

			Katholik	Budha	
1	Simoketawang	1473	5	-	-
2	Popoh	3143	1	4	-
3	Jimbaran Wetan	1650	4	-	-
4	Ketimang	2972	7	-	-
5	Pilang	5660	34/4	2	-
6	Sumberejo	3749	5	-	-
7	Mojorangagung	639	1	-	-
8	Wonokasian	5664	5	-	-
9	Ploso	3675	1	-	-
10	Jimbaran Kulon	1286	52	13 & 2	-
11	Wonoayu	4219	3	-	-
12	Semambung	4223	5	-	-
13	Simo angin- angin	2997	3	4	-
14	Tanggul	4798	3	-	-
15	Wonokalang	2852	-	-	-
16	Pagerngumbuk	3103	6	-	-
17	Plaosan	3299	-	-	-
18	Mulyodadi	2063	-	-	-
19	Lambangan	3022	-	-	-
20	Sawocangkring	2572	12	6	-
21	Becirongengor	4332	5	-	-
22	Karangpuri	5538	13	-	-
23	Candinegoro	3705	5	-	-

Sumber: Kecamatan Wonoayu Dalam angka 2017

3. Gambaran Umum Desa Wonoayu

Desa Wonoayu adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Wonoayu dengan luas wilayah 103,905 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 4.000 lebih jiwa penduduk tetap. Jiwa pemilih terdaftar 3105 orang ditahun 2019. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini maish banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis desa Wonoayu berada di Wilayah Barat Kabupaten Sidoarjo. Desa Wonoayu berasal dari istilah Wono dan Ayu, Wono artinya Alas (Hutan) dan Ayu artinya (Cantik). Dahulu asal mula Wonoayu adalah sebuah hutan yang luas tidak ada pemukiman sama sekali. Pada suatu hari datanglah seorang perempuan yang berasal dari

salah satu Kerajaan Mataram yaitu Kanjeng Putri Ayu yang merubah hutan tersebut menjadi sebuah permukiman sehingga daerah tersebut semakin meluas, dan layak huni untuk manusia.

Masyarakat Desa Wonoayu orangnya ramah dan mudah untuk bergaul, didesa Wonoayu sebagian daerahnya adalah persawahan. Beberapa penduduknya berprofesi sebagai petani, Desa Wonoayu tergolong masyarakat majemuk. Dengan beragam profesi dan beragam agama. Salah satu desa yang tergolong maju dengan melihat tingkat pendidikan masyarakatnya.

a. Batas Desa

- 1) Utara : Desa Mulyodadi
- 2) Timur : Desa Jimbaran Kulon
- 3) Selatan : Desa Popoh
- 4) Barat : Desa Semambung

b. Gambaran umum demografis :

Luas Desa Wonoayu : 103,9 Hektar

Tanah Kas Desa : 1,6 Hektar

Bengkok Pamong : 10,5 Hektar

Komplek Balai Desa : 0,35 Hektar

Tanah Kuburan : 0,525 Hektar

Tanah Lapangan : 0,320 Hektar

Sawah Masyarakat : 98 Hektar

Pekarangan Penduduk : 37 Hektar

Tanah Wakaf Dll : 0,120 Hektar

Tanah Disbun/Provinsi:

c. Jalan Desa

Panjang Jalan Kabupaten : 1.000 m

Panjang Jalan Desa : 5.800 m

Jalan Tanah : 300 m

Jumlah Jembatan Beton : 5 Buah

d. Jumlah Penduduk

Tabel 4.13
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tahun 2019
Laki-Laki	2061
Perempuan	2370
Jumlah	4431

Sumber : Arsip Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di desa wonoayu sebanyak 4.431 jiwa yang terdiri dari 2.061 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 2370 Jiwa yang berjenis kelamin Perempuan.

e. Jumlah Aparatur Desa

Perangkat Desa : 9 Orang

BPD : 5 Orang

RT : 20 RT

RW : 5 Wilayah

LPMD : 12 Orang

LINMAS : 20 Anggota

KADER : 40 Anggota

f. Komplek Balai Desa

Bangunan Kantor Desa : 1 Unit

Pendopo : 1 Unit

Balai Pelatihan/Belajar : 1 Unit

Perpustakaan : 1 Unit

g. Sarana Umum

Jumlah Masjid Jami” : 2 Buah

Musholla : 10 Buah

Gardu Siskamling : 9 Buah

A. Data dan Fokus Penelitian

Pemfokusan pada subyek dan obyek penelitian akan menjadi pilhan yang diambil peneliti. Penggunaan data primer dan data skunder dipilih dalam penelitian ini sebagai pendekatan studi kasus dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. *Pertama*, data primer diambil peneliti dengan cara wawancara langsung dengan pihak Kepala Desa Wonoayu, Pamong Desa Wonoayu, Masyarakat Desa Wonoayu.

Sedangkan data skunder diperoleh peneliti dari data-data yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder dapat ditemukan peneliti dari literatur atau berkas-berkas yang memang telah digunakan sebagai arsip. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal

dari *Undang Undang No. 6 Tahun 2014*, data Penyampain Penduduk Desa Wonoayu. Selain itu data sekunder lainnya juga diambil peneliti dari arsip desa, jurnal, internet dan segala informasi yang memiliki kaitan dengan Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Dengan berbekalkan hal tersebut diharapkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat berjalan dan memiliki tingkat akurasi yang baik.

1. Profil Desa Wonoayu

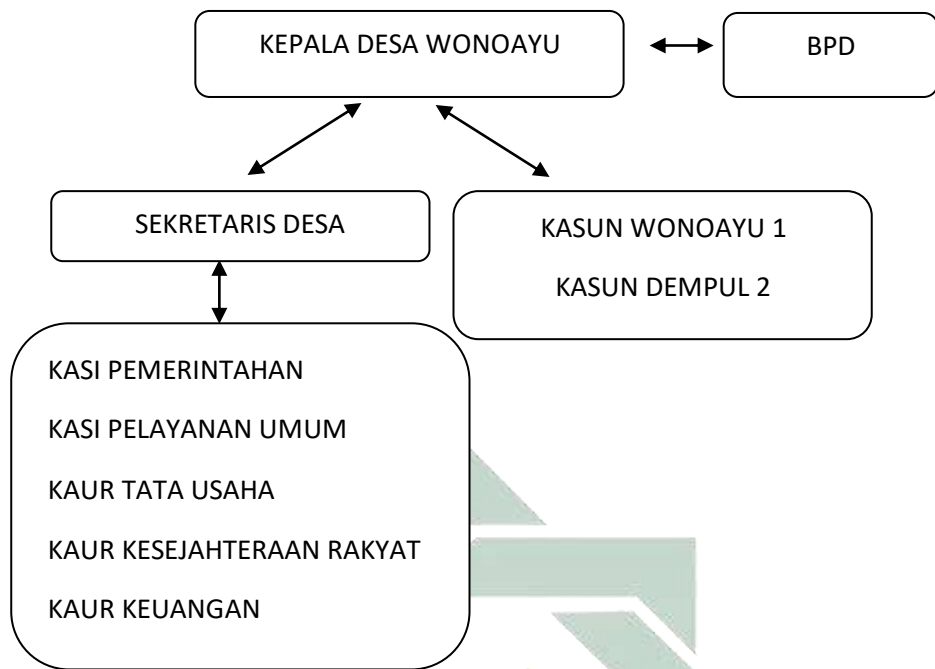
Dalam struktur birokrasi yang ada di Negara Indonesia, terdapat pembagian kerja disetiap wilayahnya mulai dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Terkait dengan pembagian yang ada di wilayah kabupaten/kota itu ada yang namanya kecamatan dibawahnya ada kelurahan dan desa. Kemudian Desa Wonoayu yang akan penulis bahas terletak di dalam wilayah administrasi Kecamatan Wonoayu.

Gambar 4.1



Kantor Desa Wonoayu

a) Struktur Organisasi



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

b) Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kepala Desa

a) Tugas Kepala Desa

(1) Kepala Desa bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

(2) Selain bertugas untuk menjalankan pemerintahan, Kepala desa juga bertugas untuk menjalankan tugas yang telah dibuat dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

b) Fungsi Kepala Desa

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

c) Wewenang Kepala Desa

(1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

(2) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;

(3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD;

(4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- (5) Membina kehidupan kemasyarakatan desa;
- (6) Membina perekonomian Desa;
- (7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- (8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d) Kewajiban Kepala Desa

- (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

UIN (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

S U (3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

(4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;

(5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

(6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa;

(7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

(8) Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik;

(9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;

(10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;

(11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;

(12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;

(13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

(14) Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan

UIN
S U (15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(16) Memberikan laporan akhir masa jabatan dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

2) Sekretaris Desa

a) Tugas Sekretaris Desa

- (1) Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
- (2) Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

b) Fungsi Sekretaris Desa

- (1) Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- (2) Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- (3) Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
- (4) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
- (5) Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta

memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;

- (6) Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (7) Penyusun laporan Pemerintah Desa;
- (8) Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
- (9) Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

3) Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan bertugas untuk mengerjakan tugas sekretaris di bidang Desa. Urusan pemerintah memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a) Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;
- b) Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;
- c) Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;

- e) Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;

4) **Urusan Umum**

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Fungsi urusan umum terdiri dari:

- a) Pengumpul dan pengolah kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan inventaris, pengatur pelaksanaan rapat dinas dan upacara.
- b) Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa):
- c) Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;

5) **Kaur Tata Usaha**

a) Tugas Pokok

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam

menyelenggarakan urusan ketatausahaan, dan pelayanan umum.

b) Fungsi Pokok

(1) Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan arsip/dokumen milik Desa, mensistematisasikan buku-buku inventaris, daftar hadir perangkat desa, dan memberikan pelayanan administratif pemerintahan desa;

(2) Penataan administrasi aparatur pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa;

(3) Penyediaan sarana dan prasarana kerja kepala desa dan perangkat desa;

(4) Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan rapat, menerima tamu dinas dan kegiatan rumah tangga desa;

(5) Pengadministrasian dan inventarisasi aset desa, perjalanan dinas, dan pemberian layanan umum.

6) Urusan Kesejahteraan Rakyat

Urusan Kesejahteraan Rakyat bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;

Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan

Rakyat mempunyai fungsi:

- a) Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b) Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- c) Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam;
- d) Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e) Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;
- f) Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- g) Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;

UIN
S U

7) Punduh/Kepala Dusun

Kepala Dusun bertugas untuk membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Kepala Dusun:

- a) Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- b) Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c) Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
- d) Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;

B. Pembangunan Infrastruktur Desa Wonoayu

Pembangunan infrastruktur ditingkat desa harus sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kebutuhan Infrastruktur, Posyandu, Posbindu, Jalan Desa, Lampu Desa, Sekolah PAUD, Jembatan, Sambungan Air, dll. Pembangunan Desa dilakukan menggunakan Dana Desa sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jika berbicara terkait dengan pembungan infrastruktur terblih dahulu peneliti memberikan sebuah tabel yang berisi tentang sumber dana untuk melakukan pembangunan.

1. Alokasi Dana Desa

Tabel 4.14
Keputusan Desa/Kelurahan Tentang APPKD Untuk Penerimaan
Pembangunan Menurut Desa/Kelurahan (dalam Rp.000) Tahun
2016

Sisa Lebih Tahun Lalu	-	
Pendatapan Asli Desa	84.149.850	
Bantuan	Bagi Hasil Pajak Kab.	102.189.040
	Bagian Dari Retribusi Kab.	7.224.276
ADD Dari Pemerintah	64.499.220	
Bantuan Tunjangan	122.868.000	
Penerimaan Lain	-	
Jumlah	380.930.386	

Arsip Kecamatan Wonoayu

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setidaknya Desa Wonoayu menerima dana sebesar Rp. 380.930.380. Dimana dana ini digunakan untuk melakukan pembangunan. Kemudian dijelaskan lagi oleh tabel dibawah ini:

Tabel 4.15
Keputusan Desa/Kelurahan Tentang APPKD Menurut
Desa/Kelurahan (dalam Rp.000) Tahun 2016

Sisa Kurang Tahun Lalu	-	
Belanja Langsung	Belanja Pegawai	36.089.040
	Belanja Barang/Jasa	60.121.217
	Belanja Modal	32.800.000
Belanja Tak Langsung – Belanja Pegawai	192.958.800	
Belanja Hibah Dan Lain-lain	-	
Jumlah	321.969.057	

Sumber: Arsip Kecamatan Wonoayu

Tabel 4.16
Keputusan Desa/Kelurahan Tentang APPKD Untuk Pengeluaran
Pembangunan Menurut Desa/Kelurahan (dalam Rp.000)
Tahun 2016

Sisa Kurang Tahun Lalu		-
Pembangunan Sarana	Belanja Bantuan Sosial	13.020.429
	Belanja Bantuan Keuangan	40.850.000
	Belanja Lain-lain	-
	Belanja Tak Terduga	5090.900
Jumlah		58.961.329

Sumber: Arsip Kecamatan Wonoayu

Tabel 4.17
Laporan realisasi penggunaan dana desa
Semester II tahun anggaran 2017
Pemerintah Desa Wonoayu
Kecamatan Wonoayu

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Pendapatan		
Dana Desa	781,147,046.88	
Penyaluran ke-1	468,688,228.13	
Penyaluran ke-2	312,458,818.75	
Belanja		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		62,194,000.00
Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan		6,750,000.00
Kegiatan Pembangunan Sistem Administrasi dan Informasi Desa		44,350,000.00
Kegiatan Penetapan Kerja Sama Antar Desa		11,094,000.00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		407,963,000.00
Pembangunan dan Perbaikan selokan/Drainase		66,165,000.00
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman/ Jalan Desa		164,430,000.00
Pembangunan dan Perbaikan Jembatan Desa		135,053,000.00
Pembangunan atau Perbaikan Sistem Pengairan/ Irigasi Desa		42,315,000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		107,178,000.00
Kegiatan Perawatan Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui		8,600,000.00
Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia		12,962,500.00

Kegiatan Pelayanan Pendidikan PAUD/TPQ		6.600.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja, Kursus, dan Pelatihan Masyarakat		41,357,000.00
Kegiatan Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga dan Air Limbah		3,225,000.00
Kegiatan Pendirian BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama		7,287,500.00
Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa berbasis digital		5,700,000.00
Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		1,200,000.00
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ LPMD		18,116,000.00
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda/ Karang taruna		2,130,000.00
Bidang Tidak Terduga		8,503,000.00
Kegiatan Kejadian Luar Biasa Lainnya/ Penanggulangan Bencana Lainnya		8,503,000.00
JUMLAH	781,147,046.88	585,838,500.00

Sumber : Arsip Kantor Desa Wonoayu

Tabel 4.18
Laporan realisasi penggunaan dana desa
Semester II tahun anggaran 2018
Pemerintah Desa Wonoayu
Kecamatan Wonoayu

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
PENDAPATAN		
Dana Desa	684,610,802.00	
Penyaluran Ke-1	136,922,160.00	
Penyaluran Ke-2	273,844,321.00	
Penyaluran Ke-3	273,844,321.00	
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		12,040,000.00

Kegiatan Penyusunan Produk Hukum		2,150,000.00
Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan		6,880,000.00
Kegiatan Penyusunan Dan Penetapan Apbdes		3,010,000.00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		331,649,500.00
Pembangunan Dan Pemeliharaan Lapangan Desa		10,340,000.00
Pembangunan Atau Perbaikan Sistem Pengairan/ Irigasi Desa		25,250,000.00
Pembangunan Atau Pengembangan Dan Pemeliharaan Pasar Desa		196,059,000.00
Penyertaan Modal Bumdes		100,000,000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		98,732,000.00
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dan Fasilitas KB		4,250,000.00
Kegiatan Perawatan Kesehatan Ibu Hamil Dan Menyusui		2,100,000.00
Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia		17,200,000.00
Kegiatan Pelayanan Pendidikan PAUD/TPQ		7,400,000.00
Kegiatan Pendirian Bumdesa Dan Atau Bumdesa Bersama		33,595,000.00
Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Desa		6,400,000.00
Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD		21,637,000.00
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani		6,150,000.00
JUMLAH	684,610,802.00	442,421,500.00

Tabel 4.19
Laporan realisasi penggunaan dana desa
Semester II tahun anggaran 2019
Pemerintah Desa Wonoayu
Kecamatan Wonoayu

URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
Pendapatan		
Dana Desa	772,985,166.00	
Penyaluran ke-1	154,597,033.00	
Penyaluran ke-2	309,194,066.00	
Penyaluran ke-3	309,194,067.00	

Belanja		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		27,692,000.00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		7,100,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		1,410,000.00
Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD		5,280,000.00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		528,726,560.00
Pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal milik Desa (Honor, Pakaian dll)		2,800,000.00
Bangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar		136,350,000.00
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)		30,776,500.00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)		17,560,000.00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polines/PKD		
Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa		
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Usaha Tani		
Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalansi Komunikasi dan Informasi local Desa		
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		26,850,000.00
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes		2,850,000.00
Pengiriman Kontingen Kepemudaan&Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota		7,200,000.00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa		11,000,000.00
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa		4,900,000.00
Pembinaan PKK		900,000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		325,176,500.00
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		11,197,000.00
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		14,206,000.00
Peningkatan Kapasitas Perangkat Des		23,386,000.00
Peningkatan Kapasitas BPD		22,520,000.00
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		3,500,000.00
Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM		3,587,500.00
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi		4,755,000.00
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa		242,025,000.00
PEMBIAYAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	242,699,702.00	
Silpa Dana Desa	242,699,702.00	
JUMLAH	1,015,684,868.00	908,445,060.00

Sumber : Arsip Kantor Desa Wonoayu

2. Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonoayu

Ketika berbicara tentang pembangunan infrastruktur desa tidak lengkap rasanya jika tidak menjabarkan macam-macam pembangunan infrastruktur yang ada. Oleh sebab itu berikut ini peneliti memberi beberapa tabel terkait macam-macam pembangunan Infrastruktur yang ada di Desa wonoayu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Pembangunan Infrastruktur dengan Dana Partisipatif
Menurut Prasarana dan Desa/Kelurahan
Tahun 2016

Prasarana Produksi	Proyek	-
	Biaya (Rp. 000)	-
Prasarana Perhubungan	Proyek	-
	Biaya (Rp. 000)	-
Prasarana Sosial	Proyek	Balai Desa
	Biaya (Rp. 000)	50.000
Prasarana Pemasaran	Proyek	-
	Biaya (Rp. 000)	-

Dari tabel diatas dapat diketahui jika pada tahun 2016 ada sebuah pembangunan infrastruktur yakni pembangunan Balai Desa dengan dana mencapai Rp. 50.000.000. kemudian pada tahun berikutnya peneliti menemukan macam-macam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Wonoayu pada tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.21
Data Pembangunan Infrastruktur Desa Wonoayu
Tahun 2017

No	Jenis Pembangunan	Dana Yang digunakan
1	Pembangunan dan Perbaikan selokan/Drainase	66,165,000.00
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman/ Jalan Desa	164,430,000.00
3	Pembangunan dan Perbaikan Jembatan Desa	135,053,000.00
4	Pembangunan atau Perbaikan Sistem Pengairan/ Irigasi Desa	42,315,000.00

Sumber: Arsip Kecamatan Wonoayu

Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2017 telah terjadi empat pembangunan, yang pertama ada pembangunan dan perbaikan selokan/drainase menggunakan dana desa sebesar 66,165,000. Yang kedua ada pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman/jalan desa menggunakan dana desa sebesar 164,430,000. Yang ketiga ada pembangunan dan perbaikan jembatan desa menggunakan dana desa sebesar 135,053,000, dan

yang keempat pembangunan atau perbaikan sistem pengairan/irigasi desa sebesar 42,315,000

Tabel 4.22
Data Pembangunan Infrastruktur Desa Wonoayu
Tahun 2018

No	Jenis Pembangunan	Dana yang digunakan
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa	10,340,000.00
2	Pembangunan atau Perbaikan Sistem Pengairan/ Irigasi Desa	25,250,000.00
3	Pembangunan atau Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Desa	196,059,000.00
4	Penyertaan Modal BUMDes	100,000,000.00

Sumber: Arsip Kecamatan Wonoayu

Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun tersebut telah terjadi empat pembangunan, yang pertama telah dibangun lapangan desa dan perbaikan yang menggunakan dana desa 10,340,000. Yang kedua ada pembangunan dan perbaikan sistem pengairan/irigasi desa menggunakan dana desa 25,250,000. Yang ketiga ada pembangunan di pasar desa menggunakan dana desa 196,059,00. Yang keempat pernyataan modal BUMDesa menggunakan dana desa 100,000,000.

Tabel 4. 23
Data Pembangunan Infrastruktur Desa Wonoayu
Tahun 2019

No.	Jenis Pembangunan	Dana yang digunakan
1	Pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2,800,000.00

2	Bangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar	136,350,000.00
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	30,776,500.00
4	Penyelenggaraan Posyandu (Mkkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	17,560,000.00

Sumber: Arsip Kecamatan Wonoayu

Dari tabel yang telah peneliti jabarkan diatas dapat diketahui ada empat pembangunan. Yang pertama ada pembangunan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa sebesar 2,800,000. Yang kedua bangunan rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan taman bacaan desa menggunakan dana desa sebesar 136,350,000. Yang ketiga ada pengelolaan perpustakaan milik desa menggunakan dana desa sebesar 30,776,500. Yang keempat ada Penyelenggraan posyandu menggunakan dana desa sebesar 17,560,000.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Analisa Dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Implementasi kebijakan adalah cara yang dilakukan dengan berdasarkan keputusan yang telah dibuat dan disetujui bersama. Implementasi kebijakan yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Dengan begitu, implementasi kebijakan dapat diterapkan di masyarakat. Awal penerapan kebijakan dimulai dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Setelahnya rancangan akan terbentuk dan siap untuk diimplementasikan. Anderson berpendapat, bahwa terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam membuat implemantasikan kebijakan. Hakekat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan, efek atau dampak implementasi merupakan kriteria dalam membuat impelentasi kebijakan.”

Fungsi implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab, adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu outcome (hasil).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya harus berpihak pada masyarakat, untuk kemajuan masyarakat dan juga pemerintahan. Pemerintah bertanggungjawab akan berjalannya suatu kebijakan agar sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Dalam kasus ini peneliti akan membahas tentang implementasi program

pembangunan diperdesan yang berada di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014. Dalam Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Program Pembangunan Desa dijelaskan bahwa terdapat dana khusus dari pemerintah. Dana khusus untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yaitu Anggaran Dana Desa dari APBN yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintahan.”

Setiap desa mendapat anggaran dana desa berbeda-beda berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Peneliti sudah melakukan beberapa wawancara kepada masyarakat Desa Wonoayu dan kepada Kepala Desa Wonoayu, dan Pengurus Pemerintah Desa Wonoayu. Bagaimana Implementasi Program Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Wonoayu. Dalam kasus ini desa wonoayu tergolong desa yang lambat dalam pembangunan infrastruktur desa. Peneliti melakukan beberapa wawancara salah satunya di kepala dusun wonoayu.

Kepala dusun wonoayu Pak Yasak “ *menerangkan bahwa pembangunan yang ada di desa wonoayu tidak berjalan sebagaimana seharusnya, banyak jalan desa yang belum dipaving dan juga lampu desa yang bukan dari desa. Bahkan bangunan balai desa, dan sekolah TK juga PAUD tidak sesuai dengan bangunan yang layak.* “

Kemudian ditambahkan pula oleh Bu YuLia Kepala PG PAUD “ *beliau menjelaskan kurangnya perhatian dari pemerintah desa wonoayu, dari segi pembangunan, hanya ada satu ruangan untuk mengajar dan aktivitas lain di PAUD. Dan tidak tersedianya kamar mandi untuk para murid. Dan jalanan sekolah yang belum dipaving. Bahkan anggaran dana setiap tahun untuk PAUD juga susah untuk cair*”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembangunan yang ada di Desa Wonoayu tidak berjalan dengan baik, itu terlihat dari beberapa fasilitas yang ada di desa belum banyak berubah. Peneliti juga menemukan adanya kendala dalam hal pendanaan yang sangat susah untuk dicairkan tentu itu juga menunjang tidak berjalannya pembangunan di desa.

Lebih lanjut lagi ditambahkan pula oleh Ibu Musiati Kepala Sekolah TK Dharmawanita Wonoayu “ *mengatakan bahwa pembangunan sekolah TK sejak tahun 1980 tidak ada perubahan yang baik. Bahkan kelas yang ditempati dua kelas adalah bangunan sejak tahun 1980, hanya . Bahkan jalanan sekolah masih berupa tanah, seharusnya sekolah yang baik untuk anak-anak adalah dipasang paving. Dan mainan juga sudah lama tidak ada perbaikan. Kamar mandinya juga masih menjadi satu dengan kamar mandi Balai Desa.*”

Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Desa Wonoayu memang ada hanya saja banyak sekali kendala dan sudah tidak berkelanjutan lagi dimana artinya sudah lama implementasi pembangunan desa tidak berjalan dengan baik.

Setelah itu dijelaskan pula oleh Bapak Jayus pensiunan PNS yang kini menjadi petani “*mengatakan bahwa untuk pembangunan pengairan desa memang sudah dibangun tapi untuk perbaikan masyarakat bergotong royong memperbaikinya sendiri.*”

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Jayus peneliti dapat mengetahui bahwa ada pembangunan pengairan desa yang sudah dibangun tetapi untuk masalah perbaikan dan perawatannya itu dilakukan oleh masyarakat Desa dengan gotong royong.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Dalam Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Edward berpendapat, bahwa terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain komunikasi yang dilakukan ketika kebijakan diterapkan, pemberian arahan yang jelas ketika kebijakan diimplementasikan, konsistensi ketika kebijakan dilakukan, dan aturan yang mengikat ketika kebijakan tersebut diterapkan. Komunikasi yang baik harus tetap terjalin dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penyampaian dalam berkomunikasi juga harus diberikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Jika komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, maka resiko miskomunikasi antar pelaksana kebijakan akan meningkat. Oleh karena itu, komunikasi antar pelaksana kebijakan harus berjalan dengan baik.

Faktor yang telah dipaparkan di atas dapat memberikan pengaruh kepada implementasi kebijakan. Hal tersebut disebabkan setiap factor memiliki kesinambungan antara satu sama lainnya. Selain itu, hubungan antar factor juga tidak dapat di satukan begitu saja. Hal tersebut disebabkan setiap factor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan memiliki kecocokan yang tidak terikat. Selain itu, jika salah satu dari keempat factor tersebut mengalami perubahan, maka factor lainnya juga dapat mengalami perubahan terhadap implementasi kebijakan yang telah dibuat.

Terkait dengan kendala yang dihadapi, hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Desa Wonoayu Pak Yus *“beliau mengatakan bahwa pihak pemerintah desa wonoayu sudah melakukan pembangunan berupa jalan desa yaitu memaving sekitar kurang lebih 200 meter dan membangun bangunan belum jadi sampai sekarang yang akan dijadikan tempat perkumpulan ibu PKK Desa Wonoayu. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa kendala untuk pembangunan jalan desa yaitu disebabkan karena masih banyak perdebatan antara jalan milik desa atau tanah milik warga.”*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak desa mengalami kendala ketika akan melakukan sebuah pembangunan yakni masih adanya perdebatan antara pemerintah desa dan warga dalam hal lahan yang akan digunakan. Ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat jalannya pembangunan desa.

Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Bu Anis Guru PG PAUD Wonoayu *“ beliau menerangkan bahwa selama mengajar di PAUD tidak ada tawaran berupa bangunan yang layak untuk sekolah PAUD. Seperti fasilitas berupa jalan yang masih tanah tidak adanya kamar mandi khusus untuk sekolah PAUD.”*

Penjelasan diatas seakan turut menjelaskan bahwa pembangunan desa masih belum maksimal ini terlihat dari tidak adanya tawaran untuk pembangunan fasilitas Pendidikan, dimana seperti yang kita ketahui bahwa fasilitas pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam pembangunan desa terutama dalam aspek kualitas pendidikan masyarakatnya.

Kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Roidah Ulyah di Polindes *“ mengatakan bahwa bangunan untuk polindes cukup baik walaupun masih kurang luas. Dan untuk halaman jalanan yang masih berupa tanah itu membahayakan jika musim hujan becek dan banyak korban yang jatuh terpeleset.”*

Dari penjelasan diatas dapat diketahui juga bahwa salah satu kendala pembangunan yang ada di Desa Wonoayu yakni pemnggunaan lahan yang kurang untuk mengoptimalkan adanya pembangunan polindes yang menurut ibu roidah kurang luas dan juga halaman yang ada di Desa Masih berupa tanah sehingga membahayakan warga yang menggunakannya.

D. Temuan Hasil Penelitian

Penarikan kesimpulan pada sebuah penelitian digunakan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang telah dibahas. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti dengan berdasarkan penyajian data dan hasil analisis data yang telah ditemukan di Desa Wonoayu. Berikut ini hasil temuan yang diperoleh peneliti:

Tabel 4.17
Temuan Hasil Penelitian

No.	Hasil Temuan	Keterangan
1	Pembangunan di desa wonoayu belum memenuhi SAP pembangunan yang sesuai Undang Undang No. 6 Tahun 2014	Dari wawancara yang dilakukan dengan Kasun Desa Wonoayu. Dapat diketahui bahwa pembanguna yang ada belum bias memenuhi standart sesuai dengan Undang-undang yang telah ada.
2	Kurangnya perhatian dari pemerintah desa wonoayu, dari segi pembangunan	Kurangnya perhatian dari pemerintah desa terutama dalam segi pembangunan fasilitas desa
3	Ada beberapa kendala untuk pembangunan jalan desa	Terdapat bebrapa kendala yang terjadi sehingga menghambat jalannya pembangunan desa
4	Tidak ada tawaran berupa bangunan yang layak untuk sekolah PAUD	Adanya temuan bahwa tidak adanya tawaran dari pemerintah desa untuk memperbaiki bangunan sekolah PAUD yang selama ini digunakan oleh masyarakat desa
5	Ada pembangunan pengairan desa	Peneliti menemukan bahwa ada pembangunan untuk pengairan desa hanya saja untuk perbaikannya masih dilakukan olek warga sendiri
6	Ada pembangunan untuk polindes yang cukup baik walaupun masih kurang luas	Kemudian peneliti menemukan juga bahwa ada pemangunan polindes yang cukup baik meskipun masih kurang luas

7	Ada tambahan bangunan dua kelas disebelah sekolah PAUD itu juga bukan desa yang membangunakan melainkan bantuan dari partai PDIP	Ada tambahan bangunan untuk kelas PAUD sebanyak dua ruang namun diketahui bahwa bukan pihak Desa yang melakukan pembangunan karna pembangunan itu merupakan bantuan dari partai PDIP
---	--	--

Berlandaskan keterangan yang mengacu pada table di atas, maka peneliti memperoleh hasil penelitian, yaitu:

1. Pembangunan di desa wonoayu belum memenuhi SAP

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembangunan yang ada di desa Wonoayu belum memnuhi SAP yang ada sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan maksimal.

2. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa wonoayu, dari segi pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa kurang perhatian terhadap pembangunan fasilitas yang ada di desa sehingga pembangunan desa terhambat.

3. Ada beberapa kendala untuk pembangunan jalan desa

Beberapa kendala dalam pembangunan desa juga secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan fasilitas Desa Wonoayu.

4. Tidak ada tawaran berupa bangunan yang layak untuk sekolah PAUD

Dari hasil temuan penelitian, dapat diketahui bahwa tidak ada tawaran untuk melakukan pembangunan fasilitas desa terutama

fasilitas pendidikan yang ada di desa yang selama ini digunakan oleh masyarakat desa.

5. *Ada pembangunan pengairan desa*

Dari hasil wawancara dengan warga peneliti mendapat temuan bahwa ada pembangunan untuk pengairan desa hanya saja informan mengatakan bahwa untuk perbaikan dan perawatannya itu dilakukan oleh warga sendiri.

6. *Ada pembangunan untuk polindes yang cukup baik walaupun masih kurang luas*

Dari hasil temuan peneliti, adanya pembangunan untuk polindes yang cukup baik meskipun menurut informan itu kurang luas.

7. *Ada tambahan bangunan dua kelas disebelah sekolah PAUD itu juga bukan desa yang membangun melainkan bantuan dari partai PDIP*

Sebagaimana temuan peneliti bahwa ada pembangunan untuk sekolah Paud Ada tambahan bangunan dua kelas disebelah sekolah PAUD itu juga bukan desa yang membangun melainkan bantuan dari partai PDIP.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan membuat dua kesimpulan yang sesuai dengan Batasan yang telah dibuat dalam penelitian ini. Kesimpulan pertama akan membahas tentang Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo). Kesimpulan kedua akan membahas tentang faktor-faktor yang mendukung serta penghambat jalannya implementasi tersebut. Berikut ini kesimpulan yang diperoleh peneliti:

1. Dalam implementasi penulis menemukan bahwa, proses-proses dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur ada banyak kurangnya dan tidak sesuai dengan SAP. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 untuk program pembangunan infrastruktur desa ditentukan dengan SAP. Program pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa, dana desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota khusus untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. dana desa diberikan setiap satu tahun sekali, total dana desa yang diberikan melihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis. Namun penulis

menemukan beberapa bangunan infrastruktur desa yang belum sesuai bahkan banyak bangunan lama yang belum di renovasi.

2. Selain itu penulis juga mengkorelasikannya dengan teori yang digunakan sehingga dapat disimpulkan setidaknya ada empat faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya sebuah kebijakan mulai dari yang **Pertama** Sumberdaya yang terbagi menjadi sumberdaya manusia yakni pihak Kepala Desa dan para jajarannya yang mempunyai wewenang dalam hal menjalankan implementasi atau sebagai implementator kemudian sumberdaya non-manusia yakni berupa dana yang diberikan pemerintah guna menunjang proses implementasi. **Kedua** yakni komunikasi dimana pihak Kepala Desa dan jajarannya selaku implementator selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah agar berjalannya program pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014. **Ketiga** adalah struktur birokrasi yakni dalam sebuah kebijakan tentunya ada sebuah pembagian kewenangan agar sebuah kebijakan tidak tumpang tindih dengan pihak lain dalam hal ini pihak kepala desa dan jajarannya.

Daftar Pustaka

Hernowo, Basah. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2004.

Kamaludin, Rustian. Beberapa Aspek Pembangunan Nasional Dan Daerah. (Jakarta: Galia Indonesia, 1983).

Moh. Sofiyanto Ronny, Malavia Mardani, M. Agus Salim, E—Jurnal Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Banyuwates Kabupaten Sampang, Vol. 6, No. 4, 2017).

Undang-Undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Ginandjar kartasasmita. Pembangunan untuk rakyat memadukan pertumbuhan dan pemerataan. (jakarta: 1996).

Melis, Abd. Aziz. Jurnal ekonomi analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi di desa wawolesea kecamatan lasolo kabupaten kanowe utara), april 2016.

Affan gaffar, politik indonesia: transisi mamuju demokratis. (yogyakarta: pustaka pelajar, 2009).

Nurdin Usman, konteks implementasi berbasis kurikulum. (jakarta: garsindo, 2002).

Guntur setiawan. Implementasi dalam birokrasi pembangunan. (jakarta: balai pustaka 2004).

Hanifa, harsono. Implementasi kebijakan dan politik. (bandung: Pt. Mutiara sumber widya. 2002).

Leo, agustino. Dasar-dasar kebijakan publik. (bandung: alfabeta, 2008).

Solichin, abdul wahab. Analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara edisi kedua. (jakarta: bumi aksara. 2008).

Abdul, aziz. Implementasi kebijakan publik studi tentan kegiatan pusat informasi pada dinas komunikasi dan informatika provinsi sumatera utara). Vol. 3, no. 1, juni 2013.

Budi, winarno. Teori dan proses kebijakan publik. (yogyakarta: pustaka pelajar. 2002).

Aziz syamsuddon. Proses & teknik penyusunan undang-undang. (jakarta: sinar garfika, 2011).

Riyadi dan deddy supriyadi di bratakusumah. Perencanaan pembangunan daerah. (jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2005).

Sondang P. Siagian. Admnistrasi pembangunan. (jakarta: pt. Bumi aksara. 2001).

Risma handayani. Pembangunan masyarakat pedesaan. (makassar: alaudin university press. 2014).

Kwik kian gie. Pembiayaan pembangunan infrastruktur dann permukiman materi kuliah disampaikan pada stadium general institut teknologi bandung. 2002.

Kodoatie, robbert j. Pengantar manajemen infrastruktur. (yogyakarta: pustaka pelajar. 2005).

Mankiw, N Greory. Pengantar ekonomi edisi ke dua. (jakarta: erlangga. 2003).

Rindang bangun dan muhammad firdaus. Jurnal pengaruh infrastruktur paa pertumbuhan ekonomi wilayah di indonesia. 2009.

Djuni pristiyanto. Buku 1: panduan rencana pembangunan jangka menengah desa cetakan pertama. (jakarta: yayasan penabul. 2015).

Rulan ahmadi. Metode penelitian kualitatif. (yogyakarta: Ar- Ruzz media. 2014).

Burhan bungin. Penelitian kualitatif edisi kedua. (jakarta: kencana prenatal media group) 2011.

Rulam ahmadi. Metodologi penelitian kualitatif. (yogyakarta: Ar ruzz media 2014).

Soerjono sokarno. Pengantar penelitian hukum. (jakarta: rineka cipta). 1983.

Asroff syifa'i. Metode logi penelitian pendidikan. (surabaya: elkaf. 2005)

Burhanuddin bugin. Metodologi penelitian sosial. (surabaya: aerlangga university press. 2011).

Andi prasetyo. Motode penelitian kualitatif dalam prespektif rancangan penelitian. (yogyakarta: ar-ruzz media 2011).

Sugiyono. Etode penelitian kualitatif R&D. (bandung: alfa beta 2014).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A